ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN *LOCAL CURRENCY SETTLEMENT*

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Hubungan Internasional

Oleh:

Fayiz Wishal Kurnianto

NIM I72217040

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

NOVEMBER 2021

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fayiz Wishal Kurnianto

NIM : I72217040

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul : **"Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Perdagangan Bilateral Menggunakan *Local Currency Settlement*"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila skripsi ini di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Jombang, 20 Oktober 2021

Yang Menyatakan

Fayiz Wishal Kurnianto

NIM : I72217040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fayiz Wishal Kurnianto

NIM : I72217040

Program Studi : Hubungan Internasional

Yang berjudul, **"Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Perdagangan Bilateral Menggunakan *Local Currency Settlement*",** saya berpendapat bahwa skripsi sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 20 Oktober 2021

Ridha Amaliyah, S.I.P., MBA.

NUP 201409001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Fayiz Wishal Kurnianto dengan judul: **"Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Perdagangan Bilateral Menggunakan *Local Currency Settlement*"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 5 November 2021.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I	Penguji II
Ridha Amaliyah, S.I.P., MBA.	**M. Fathoni Hakim, S.H.I., M.Si.**
NUP 201409001	**NIP 198401052011011008**

Penguji III	Penguji IV
M. Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQnR.	**Zaky Ismail, M.S.I.**
NIP 198408232015031002	**NIP 198212302011011007**

Surabaya, 10 Januari 2022

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan

Prof. Akh. Muzakki, Grad.Dip.SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D.
NIP 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama: Fayiz Wishal Kurnianto
NIM: I72217040
Fakultas/Jurusan: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Hubungan Internasional
E-mail address: fwkurnianto17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP TIONGKOK DALAM PERDAGANGAN BILATERAL MENGGUNAKAN LOCAL CURRENCY SETTLEMENT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2022
Penulis

(Fayiz Wishal Kurnianto)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRACT

Fayiz Wishal Kurnianto, 2021, *Analysis of Indonesia's Interest in China in Bilateral Trade Using Local Currency Settlement, Thesis of the International Relations Study Program Faculty of Social and Political Sciences UIN Sunan Ampel Surabaya.*

***Keyword*: *Local Currency Settlement*, Indonesia, Tiongkok, *Bilateral Trade*.**

Indonesia and China have agreed on a memorandum of understanding on September 30, 2020, to support bilateral trade between the two countries using Local Currency Settlement. This study aims to explain the reasons that Indonesia has in agreeing to the Local Currency Settlement cooperation. The type of research used in compiling this research is explanatory qualitative while the data collection method is documentation. In supporting this research, the researcher uses the concept of bilateral trade, Local Currency Settlement, national interest and rational choice theory according to D. Snidal. This study found that, the reason why Indonesia agreed on a Local Currency Settlement with China was for: first, avoiding Indonesia from the influence of a fluctuating US Dollar. Second maintaining the stability of the Rupiah exchange rate. Third, assist in efforts to improve Indonesia's sustainable national development.

ABSTRAK

Fayiz Wishal Kurnianto, 2021, Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Perdagangan Bilateral Menggunakan *Local Currency Settlement*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Imu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: *Local Currency Settlement*, Indonesia, Tiongkok, Perdagangan Bilateral.

Indonesia bersama Tiongkok telah menyepakati nota kesepahaman pada 30 September 2020, untuk mendukung perdagangan bilateral antara kedua negara dengan menggunakan *Local Currency Settlement.* Penelitian ini bertujuan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan alasan yang dimiliki Indonesia dalam menyepakati kerjasama *Local Currency Settlement* tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini ialah kualitatif eksplanatif sedangkan metode pengumpulan datanya ialah dokumentasi. Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan konsep perdagangan bilateral, *Local Currency Settlement*, kepentingan nasional dan teori pilihan rasional menurut D. Snidal. Penelitian ini menemukan bahwa, alasan mengapa Indonesia menyepakati *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok ialah guna: pertama, menghindarkan Indonesia dari pengaruh Dolar AS yang fluktuatif. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. Dan ketiga, ialah membantu dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing ……..…… i

Lembar Pengesahan ……. ii

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi ……... iii

Motto …… iv

Pernyataan Pertanggung Jawaban Penulisan Skripsi …… iv

Abstrak ……... vi

Daftar Isi ……..... viii

Daftar Tabel …… x

Daftar Grafik …….. xi

Bab I Pendahuluan ……. 1

A. Latar Belakang Masalah ……. 1
B. Rumusan Masalah …….. 10
C. Tujuan Penelitian ……... 11
D. Manfaat Penelitian ……. 11
E. Tinjauan Pustaka ……..... 12
F. Argumentasi Utama …… 21
G. Sistematika Pembahasan……. 21

Bab II Kerangka Berfikir……... 23

A. Kerangka Konseptual ……..... 23
   1. Perdagangan Bilateral ……. 23
   2. *Local Currency Settlement* …….. 25
   3. Kepentingan Nasional…….. 25
B. Kerangka Teoritik: Teori Pilihan Nasional Menurut Duncan Snidal …...……..….. 28

Bab III Metode Penelitian ……. 32

A. Jenis dan Pendekatan penelitian ……. 32
B. Lokasi dan Waktu penelitian …….. 34
C. Tingkat Analisa Data …….. 34
D. Tahapan Penelitian ……. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Data ……. 35
F. Teknik Analisa Data ……... 36

Bab IV Penyajian dan Analisa Data……... 38

A. Sejarah dan Perkembangan Hubungan Perdagangan Indonesia-Tiongkok …… 38
1. Hubungan Indonesia-Tiongkok Era Pra-Kemerdekaan……. 38
2. Hubungan Indonesia-Tiongkok Era Orde Lama…… 42
3. Hubungan Indonesia-Tiongkok Era Orde Baru……. 44
4. Hubungan Indonesia-Tiongkok Era Reformasi – Sekarang... 47

B. Pasar Uang dan *Local Currency Settlement* di Indonesia…… 51
1. Perkembangan Pasar Uang di Indonesia ……..…….. 52
2. Sejarah *Local Currency Settlement* di Indonesia …….. 58
3. Mekanisme Penerapan *Local Currecy Settlement* …..…….. 59
4. Manfaat Penerapan *Local Currency Settlement* …… 62
5. Negara Mitra Indonesia Dalam Penerapan *Local Currency Settlement* …… 66

C. Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Kerja Sama *Local Currency Settlement* ……..... 76
1. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional …….……. 76
2. Rasionalisasi Indonesia dalam Kesepakatan dengan Tiongkok Sebagai Mitra dalam *Local Currency Settlement*.. 79
3. Potensi Dampak dari Kesepakatan Indonesia-Tiongkok Dalam *Local Currency Settlement* ……...……. 85

Bab V Penutup ……. 86

A. Kesimpulan ……. 87
B. Saran …… 88

Daftar Pustaka ……. 89

Lampiran ……. 95

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lima Negara Dengan Pasar Ekspor Non Migas Terbesar Di Indonesia…….. 8

Tabel 4.1 Mekanisme Pelaksanaan *Local Currency Settlement*……. 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Total Perdagangan Indonesia - Malaysia …… 67

Grafik 4.2 Total Perdagangan Indonesia – Thailand …… 68

Grafik 4.3 Total Perdagangan Indonesia – Jepang …… 70

Grafik 4.4 Total perdagangan Indonesia – Tiongkok …… 71

Grafik 4.5 Total Share Perdagangan di Indonesia ……. 71

Grafik 4.6 Grafik pertumbuhan Ekonomi Tiongkok vs Amerika Serikat ……. 73

Grafik 4.7 Tingkat Likuiditas Dolar AS yang Masih Mendominasi Pasar di Indonesia …… 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia dan Tiongkok memiliki sejarah hubungan yang cukup lama bahkan sebelum era NKRI dimana Indonesia sering disebut sebagai Nusantara. Hubungan tersebut bermula di jalur sutra (yang saat ini menjadi pondasi dari *Belt and Road Initiative*) dan jalur laut pada masa sebelum dinasti Han. Kota-kota besar Tiongkok pada zaman dahulu yang menjadi pusat perdagangan melalui jalur laut diantaranya ialah Guangzhou, Quanzhou, Hangzhou, Mizhou, Wenzhou, dan Mingzhou.[2] Sejak era dinasti sebelum dinasti Han hingga era dinasti Ming, hubungan yang dimiliki oleh Indonesia-Tiongkok lebih kepada agama dan perdagangan serta isu-isu politik. Perdagangan laut Tiongkok sendiri telah berkembang pesat pada masa dinasti Tang dan Song dengan Guangzhou sebagai salah satu kota pusat perdagangan internasional yang terbesar pada masanya, jaringan perdagangannya hingga mencapai Asia Tenggara yang merupakan daerah dengan jalur perdagangan yang ramai dan padat. Kemudian pada awal abad ke 15, di Jawa dan Sumatra mulai bermunculan komunitas-komunitas orang Tiongkok yang sekarang disebut komunitas Tionghoa.[3]

[2] Dharwis Widya, Utama Yacob, and M Si, "Indonesia-Tiongkok Dari Khazanah Arsip Statis Indonesia-China on Archives Collection," n.d., 51–64.

[3] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan tersebut terus terjalin hingga tiba pada era modern dimana Indonesia dan Tiongkok mempunyai riwayat hubungan bagaikan pasang surut air laut. Ada kalanya mengalami hubungan yang buruk seperti yang terjadi pada masa Presiden Soeharto yang sempat membekukan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok pada periode 1968-1990 yang kemudian berakhir pada 3 Juli 1990,[4] yang disebabkan oleh peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dimana pada saat itu terjadi peristiwa perebutan kekuasaan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap pemerintahan sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia menganggap Tiongkok mempunyai peran besar dalam membantu rencana Partai Komunis Indonesia (PKI).[5] Ada pula saat memiliki hubungan manis seperti di era Presiden Jokowi saat ini yang mana sejak tahun 2016 Indonesia menjalin kesepakat kerja sama dengan Tiongkok melalui program kebijakan *Belt and Road Initiative* dengan berbagai bentuk pendanaan serta transfer tenaga kerja dari Tiongkok dalam pembangunan sejumlah infrastruktur untuk kepentingan peningkatan ekonomi politik Indonesia.[6] Namun jauh sebelum Indonesia tergabung sebagai anggota dalam program *Belt and Road Initiative* (BRI), hubungan perdagangan Indonesia-Tiongkok sendiri telah meningkat pesat setelah

[4] "Memaknai 'Tahun Persahabatan' Indonesia-Cina," accessed October 13, 2021, http://www.politik.lipi.go.id/kolom/324-memaknai-tahun-persahabatanindonesia-cina.html.

[5] "Hubungan Indonesia-China: Rumit Tapi Tak Lekang Zaman," accessed October 13, 2021, https://www.matamatapolitik.com/news/analisis-hubungan-indonesia-china-sejarah-dan-perkembangannya-saat-ini.

[6] Artha Yudilla, "Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia," *Journal of Diplomacy and International Studies* 2, no. 1 (2019): 52–65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Aggrement* (*ACFTA*) pada tahun 2010 yang pada tahun kedua kerja sama tersebut berlangsung, total perdagangan Indonesia-Tiongkok mengalami peningkatan cukup signifikan menyentuh angka 49,15 Miliar Dolar AS dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 36,11 Miliar Dolar AS.[7]

Hubungan antara Indonesia-Tiongkok sendiri telah menginjak usia 70 tahun pada 13 April 2020.[8] Hubungan tersebut dimulai oleh Presiden Soekarno yang berujung kepada hubungan diplomatik resmi melalui pengadaan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955.[9] Dari usia hubungan yang dimiliki oleh Indonesia-Tiongkok terlihat betapa erat hubungan kedua negara ini, ekonomi Tiongkok pun saat ini berubah menjadi lebih baik dan telah mampu untuk melawan hegemoni dari Amerika Serikat. Hal tersebut membuat hubungan Indonesia-Tiongkok semakin erat ditambah mengingat posisi Tiongkok saat ini yang merupakan pasar ekspor terbesar dari Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Indonesia, sepanjang tahun 2020 total ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai 30 juta Dolar AS. Dibandingkan dengan AS yang mengimpor dari Indonesia senilai tidak sampai 20 juta Dolar AS untuk

---

[7] Sulthon Sjahril Sabaruddin, "Dampak Liberalisasi Perdagangan RI-China Terhadap Perubahan Perdagangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Ssebuah Pendekatan Ekuilibrium Parsial (SMART Model) Dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 3 (2016): 33, https://doi.org/10.24914/jeb.v17i3.287.

[8] "Peringati 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Tiongkok Luncurkan Sampul Dan Perangko Peringatan | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," accessed October 13, 2021, https://kemlu.go.id/portal/id/read/1191/siaran_pers/peringati-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-tiongkok-luncurkan-sampul-dan-perangko-peringatan.

[9] "Catatan Peristiwa Penting Dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia," accessed October 13, 2021, https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceindo/indo/ztbd/tk/t628164.htm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk non migas.[10] Dari data tersebut terlihat bahwa peran Tiongkok terhadap perekonomian Indonesia lebih besar ketimbang Amerika Serikat yang notabene berstatus sebagai negara *super power*. Hal tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak faktor yang terlihat yang membuat Indonesia menyepakati kerja sama dengan Tiongkok dalam kebijakan transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan *Local Currency Settlement*.

Transaksi perdagangan bilateral dengan menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* (LCS) merupakan penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara dimana settlement transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.[11] Jadi, dalam melakukan transaksi, suatu negara melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing berdasarkan acuan oleh *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) atau bank yang ditunjuk oleh otoritas kedua negara untuk memfasilitasi pelaksanaan *Local Currency Settlement*[12] sehingga tidak mengacu kepada Dolar AS dalam prosesnya. Dalam hal ini Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan transaksi perdagangan menggunakan

[10] Codingest, "Beranda - Portal Satudata Perdagangan," Satu Data Kemendag, accessed October 13, 2021, //satudata.kemendag.go.id/.

[11] "FAQ Local Currency Settlement," accessed October 13, 2021, https://www.bankmandiri.co.id/faq-local-currency-settlement1.

[12] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang lokal atau *Local Currency Settlement* dengan beberapa negara diantaranya Malaysia, Thailand, Jepang,[13] dan yang terbaru ialah Tiongkok.

Adanya *Local Currency Settlement* tersebut secara tidak langsung membuat posisi Dollar AS sebagai mata uang internasional terancam. Terlebih lagi nilai kurs dari Dolar AS yang cenderung fluktuatif. Selain itu, terjadinya fenomena dedolarisasi membuat banyak negara yang memiliki ketergantungan terhadap Dolar AS yang tinggi, berusaha untuk membatasi ketergantungannya. Wakil Direktur di *think-tank* energi dan keamanan dari Institute for *Analysis of Global Security,* Anne Korin mengatakan bahwa negara yang memiliki pengaruh seperti Tiongkok, Rusia dan Uni Eropa mempunyai latar belakang motivasi yang besar untuk melakukan de-dolarisasi. Salah satu faktor yang mengurangi ketertarikan negara-negara besar tersebut ialah kewajiban untuk mematuhi yurisdiksi AS ketika negara-negara tersebut melakukan transaksi menggunakan Dolar AS.[14]

Beberapa negara Islam seperti Qatar, Malaysia, dan juga Turki, sedang membuka mempertimbangkan untuk mencipptakan jalur perdagangan sendiri menggunakan emas. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menerangkan bahwa perdagangan akan mengaplikasikan dengan cara barter sebagai upaya lindung nilai. Beliau

[13] Wahyu Daniel, "Ingin Kurangi Ketergantungan Dolar AS, Ini Yang Dilakukan BI," CNBC Indonesia, accessed October 13, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125164845-17-218585/ingin-kurangi-ketergantungan-dolar-as-ini-yang-dilakukan-bi.

[14] Rehia Sebayang, "Ramai Negara Besar Dunia Kini Buang Dolar, Ada Apa?," *CNBC Indonesia* 31 Oktober 2019, diakses pada 26 Maret 2021. https://www.cnbcindonesia.com/investment/20191031171118-21-111798/ramai-negara-besar-dunia-kini-buang-dolar-ada-apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan bahwa hal ini dilakukan demi kepentingan negara-negara Islam, dengan gagasan bahwa negara Islam harus dapat mandiri dalam menghadapi ancaman terhadap perekonomian yang berpotensi terjadi di masa depan.[15]

Banyaknya negara-negara yang mulai membatasi ketergantungan dengan Dolar AS tersebut, yang dilakukan dengan berbagai macam metode, juga dapat dijadikan sebagai salah satu alasan bagi Indonesia dalam menerapkan kebijakan transaksi perdagangan bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara atau juga disebut sebagai *local currency settlement* (LCS). Dengan mengurangi penggunaan Dolar AS, maka dapat meningkatkan likuiditas *local currency* atau mata uang lokal serta dapat mendorong diversifikasi mata uang di pasar valuta asing domestik. Sehingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan kurs Rupiah.[16]

Gubernur BI Perry Warjiyo bersama dengan Gubernur *People's Bank of China* (PBoC) Yi Gang telah menyepakati nota kesepahaman untuk kerja sama kerangka perdagangan menggunakan *Local Currency Settlement* Pada 30 September 2020. Kemudian Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menjelaskan, bahwa dengan adanya kerja sama ini, artinya Indonesia

---

[15] Deutsche Welle (www.dw.com), "Negara Islam Berencana Ganti Dolar dengan Emas Sebagai Alat Tukar | DW | 23.12.2019," DW.COM, accessed October 13, 2021, https://www.dw.com/id/negara-islam-berencana-ganti-dolar-dengan-emas-sebagai-alat-tukar/a-51776798.

[16] Bank Indonesia, "Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern Dan Maju Di Era Digital," *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025*, 2020, 1–67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama Tiongkok dapat menerapkan kuotasi nilai tukar secara langsung atau *direct quotation* dalam perdagangan antar bank untuk mata uang Yuan-Rupiah. Dimana kedua negara yakni baik Indonesia maupun Tiongkok memandang hal tersebut dapat berkontribusi positif dalam mendorong penggunaan *Local Currency Settlement* untuk pelaksanaan transaksi perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia-Tiongkok.[17] Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan memperkuat hubungan kerja sama kedua negara baik dalam hal ekonomi dan perdagangan maupun politik. Apalagi ditambah dengan fakta bahwa Indonesia tergabung sebagai anggota dalam program besar Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI), yang menjadikan peluang besar bagi perkembangan *Local Currency Settlement* dengan banyaknya kegiatan perdagangan dan investasi Indonesia-Tiongkok. Selain dengan Tiongkok, Indonesia juga telah menyepakati kerja sama transaksi perdagangan menggunakan *Local Currency Settlement* dengan beberapa negara lain diantaranya Malaysia, Thailand, Jepang.[18]

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan bahwa Bank Indonesia sejauh ini telah berhasil menjalin komunikasi dengan bank sentral beberapa negara, seperti Thailand, Jepang, dan Malaysia, untuk penggunaan *Local Currency Settlement* dalam transaksi perdagangan. Perry menjelaskan

[17] Grahanusa Mediatama, "Bank Indonesia dan PBoC sepakati penggunaan local currency settlement (LCS)," kontan.co.id, September 30, 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-dan-pboc-sepakati-penggunaan-local-currency-settlement-lcs.

[18] Wahyu Daniel, "Ingin Kurangi Ketergantungan Dolar AS, Ini Yang Dilakukan BI," CNBC Indonesia, accessed October 13, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125164845-17-218585/ingin-kurangi-ketergantungan-dolar-as-ini-yang-dilakukan-bi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa Bank Indonesia sedang dalam upaya memperbanyak jumlah bank yang ditunjuk oleh otoritas negara yang bersangkutan (Bank ACCD) untuk bisa melakukan transaksi menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk bisa diaplikasikan dengan banyak bank. Bank Indonesia mendorong agar bank-bank yang ditunjuk mendapatkan fleksibilitas dan fasilitas, supaya negara yang bersangkutan dapat melakukan transaksi dengan mata uang lokal.[19] Dari penerapan kebijakan hubungan kerja sama Indonesia dalam penggunaan transaksi perdagangan menggunakan *Local Currency Settlement* terhadap banyak negara lain seperti Malaysia, Thailand serta Jepang sudah sewajarnya Indonesia menjalin kesepakatan dengan Tiongkok, Mengingat Tiongkok merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia mengacu pada data Kementerian Perdagangan.

Tabel 1.1 Lima Negara Dengan Pasar Ekspor Non Migas Terbesar Di Indonesia.
Sumber: Kementerian Perdagangan Indonesia

Local Currency Settlement juga termasuk dalam rencana Bank Indonesia untuk mempercepat pendalaman pasar keuangan, yang mana

[19] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah tercantum dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. Blueprint Pengembangan Pasar Keuangan 2025 tersebut berbunyi bahwa, Bank Indonesia akan selalu berupaya penuh dalam pengembangan *Local Currency Setlement* untuk memperluas jangkauan bank yang mampu memfasilitasi terlaksananya *Local Currency Settlement* melalui pembukaan rekening negara mitra di Indonesia yang juga disebut sebagai *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) agar pasar dapat dengan mudah dalam memanfaatkan adanya *Local Currency Settlement*. Dikarenakan hal tersebut akan memberikan dampak menguntungkan untuk para pelaku ekspor dan impor dengan pengurangan biaya transaksi yang dapat meningkatkan efisiensi dalam investasi dan perdagangan.[20]

Blueprint tersebut juga menjelaskan mengenai rencana Bank Indonesia dalam memperluas *underlying Domestic Non Delivery Forward* (DNDF) guna meningkatkan likuiditas pasar valuta asing yang dilakukan dengan memperkuat kurs referensi yang tercatat di *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan nilai tukar, termasuk juga didalamnya ialah implementasi *central counterpatry* (CCP), dan ETP *multimatching*. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan terintegrasi satu sama lain supaya mampu untuk memperdalam pasar uang yang di dalamnya termasuk juga *Local Currency Settlement*.[21]

---

[20] Grahanusa Mediatama, "BI jajaki kerjasama local currency settlement dengan Jepang dan China," kontan.co.id, December 17, 2020, https://nasional.kontan.co.id/news/bi-jajaki-kerjasama-local-currency-settlement-dengan-jepang-dan-china.

[21] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang menjadi daya tarik utama dari *Local Currency Settlement* ialah pelaku usaha mendapatkan harga transaksi yang lebih efisien dengan penggunaan kuotasi langsung (*direct quotation*) dari pada kuotasi silang (*cross rate*). Yang kemudian membawa para pelaku pasar untuk berpindah haluan dengan penggunaan terhadap mata uang lokal sebagai alat transaksi menggantikan penggunaaan mata uang internasional yakni Dolar AS. Bersamaan dengan banyaknya volume transaksi tersebut, sekaligus akan meningkatkan likuiditas transaksi menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement*) yang artinya dapat membawa kestabilan terhadap Rupiah.[22]

Dengan dihadirkannya baerbagai macam data mengenai latar belakang hubungan Indonesia Tiongkok, serta proses dan sistem pelaksanaan dari *Local Currency Settlement*, diharapkan dapat membantu penelitian ini dalam menganalisis mengenai Kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok dalam perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement*.

B. RUMUSAN MASALAH

Mengenai rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti untuk kemudian diketahui jawabannya ialah: "Mengapa Indonesia menyepakati

[22] Bank Indonesia, "Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern Dan Maju Di Era Digital."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja sama perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok"

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah peneliti utarakan diatas, tujuan penelitian diuraikan menjadi: "Untuk mengetahui mengapa Indonesia menyepakati kerja sama perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement*"

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membawa manfaat baik itu di bidang akademis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan wawasan ilmu Hubungan Internasional, serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk para peneliti yang hendak memperdalam mengenai kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok dalam perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement*.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat tidak hanya bagi para akademisi, tetapi juga untuk instansi maupun organisasi internasional yang berfokus pada masalah Kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok dalam perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement*. sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dijadikan acuan untuk analisis selanjutnya. Selain itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk memberikan pemahaman lebih mengenai topik yang diteliti sehingga dapat berguna dimasa mendatang.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam topik penelitian ini, yang menyoroti mengapa Indonesia menyepakati *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok. Disini Peneliti juga ingin memaparkan beberapa contoh penelitian sebelumnya dengan fokus topik yang bermacam-macam tetapi masih memiliki hubungan dengan: kerja sama dan perdagangan bilateral Indonesia, kepentingan Indonesia dalam menjalin kerja sama serta penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi perdagangan, guna menunjukkan perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya.

Studi pustaka yang pertama, berupa artikel Hubungan Internasional Universitas Mulawarman yang ditulis oleh Hadi Nur Muta'ali pada tahun 2020 yang berjudul "*Kepentingan Indonesia, Malaysia, Thailand terhadap kerjasama Local Currency Settlement Framework (LCS)*". Dalam penelitian ini, dijelaskan mengenai kepentingan Indonesia dalam melakukan kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) atau transaksi perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal. Dijelaskan bahwa Indonesia beserta Malaysia dan Thailand melakukan kerja sama tersebut guna mengurangi ketergantungan atas penggunaan mata uang Dolar AS sebagai mata uang Internasional. Dari hal tersebut diketahui bahwa penggunaan mata uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokal sebagai alat transaksi disepakati Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam bentuk MOU pada 23 Desember 2016 dan telah resmi dilaksanakan tepat dua tahun setelah penandatanganan MOU pada 2 Januari 2018.[23] Yang menjadi perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah, subjek penelitiannya yang mana pada artikel tersebut meneliti kesepakatan antara negara Indonesia Malaysia dan Thailand dalam hal penggunaan mata uang lokal (LCS) sedangkan dalam penelitian ini ialah Indonesia dengan Tiongkok. Serta dalam penelitian ini tidak berfokus kepada penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi perdagangan, Melainkan kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menyepakati hal tersebut.

Selanjutnya merupakan artikel Hubungan Internasional, Universitas Airlangga yang ditulis oleh Arisa Permata Siwi pada tahun 2013 dengan judul *"Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China dalam Kerangka ACFTA"*. pada jurnal tersebut, dijelaskan mengenai hubungan perdagangan yang dimiliki Indonesia-Tiongkok melalui perjanjian ACFTA atau *ASEAN China Free Trade Area*. Yang didalamnya terdapat Perjanjian diantara negara anggota ASEAN dengan Tiongkok dalam hal perdagangan yang bertujuan meningkatkan perekonomian negara masing-masing. Walaupun memiliki tujuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya pemerintah Indonesia mendapat tentangan dari dalam negeri seperti dari kalangan pengusaha dan buruh yang menganggap bahwa

[23] Hadi Nur Muta, "Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama Local Currency Settlement Framework (Lcs)," *E Journal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2020): 212–22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) membawa dampak negatif bagi Indonesia. Fokus dari jurnal ini ialah membahas mengenai mengapa Indonesia tetap melaksanakan ikut serta dalam mengimplementasi *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) walaupun dalam pelaksanaannya muncul beragam persoalan.[24] Sama-sama mengusung kecurigaan mengenai kepentingan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Namun yang menjadi perbedaan ialah, dalam hal studi kasusnya jika dalam jurnal tersebut mebahas perdagangan Indonesia-Tiongkok dengan dalam kerangka *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) sedangkan di penelitian ini ialah skema penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi perdagangan Indonesia-Tiongkok.

Selanjutnya ialah skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, karya Reffida Dyah Arisanti pada tahun 2019 yang berjudul *"Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia Dibawah Kerjasama Bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017"* dimana di dalamnya membahas mengenai kepentingan yang dimiliki oleh Jepang dalam menjalani kesepakatan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan Indonesia. Ada apa dibalik kesepakatan tersebut, mengapa kesepakatan tersebut terlaksana.[25] Memiliki persamaan konsep yang disusung dengan penelitian peneliti saat ini hanya saja berbeda

[24] Arisa Permata Siwi, "Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China Dalam Kerangka ACFTA," *Hubungan Internasional*, 2015, 1–17.

[25] Reffida Dyah Arishanti, "Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia Di Bawah Kerjasama Bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017," 2019, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pada subjek dan objek penelitiannya. Sama-sama meneliti mengenai kepentingan suatu negara dalam menyapakati kerja sama bidang ekonomi adalah hal yang menjadi titik temu antara penelitian karya Reffida dengan penelitian peneliti saat ini.

Selanjutnya merupakan artikel dinamika ekonomi pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang ditulis oleh Rachmaniar Dwi Zulfira pada tahun 2019 yang berjudul *"Dampak Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Jepang Sebelum dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement."* Dimana pada artikel tersebut dijelaskan bahwa penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan terhadap transaksi yang dilakukan baik itu dari sektor impor, ekspor maupun investasi antara dua negara sebelum dan sesudah terjadinya kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Sehingga dapat diketahui dampak dari adanya kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) tersebut.[26] Mengusung topik dampak kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang memiliki kesamaan terhadap penelitian ini yakni berada dalam ruang lingkup studi ekonomi politik serta terfokus kepada "dampak" sebelum dan sesudah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang artinya terdapat kepentingan nasional yang bermain. Mengenai perbedaannya sendiri diantaranya ialah, ada pada studi

[26] Rachmaniar Dwi Zulfira, "Dampak Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Jepang Sebelum Dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 124–34, https://doi.org/10.33005/jdep.v2i1.83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasusnya pada penelitian ini mengusung kasus penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi perdagangan bilateral antara Indonesia-Tiongkok (LCS) sedangkan pada jurnal tersebut mengusung mengenai *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

Selanjutnya merupakan artikel Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau yang ditulis oleh Artha Yudilla pada tahun 2019, yang berjudul *"kerja sama Indonesia China dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluangdan Ancaman Untuk Indonesia."* Pada artikel tersebut dijelaskan mengenai *Belt and Road Initiative* (BRI) yang merupakan kebijakan pemerintah Tiongkok pada masa pemerintahan presiden Xi Jinping yang mempunyai tujuan terhadap pembangunan ulang jalur sutra. Kebijakan ini merupakan bentuk penyempurnaan dari kebijakan dengan visi yang sama yakni kebijakan *One Belt One Road* (OBOR) pada tahun 2013 dengan total pendanaan diperkirakan mencapai triliunan Dolar AS. Berangkat dari hal tersebut, Tiongkok membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) yang mempunyai tujuan membantu pendanaan infrastruktur kepada negara-negara anggota yang sekaligus memperkuat kebijakan *Belt and Road Initiative*. Berkaitan dengan hal tersebut sejumlah kritikan muncul terkait keputusan Indonesia bergabung menjadi anggota AIIB dan ikut dalam program *Belt and Road Initiative*.[27] Jurnal tersebut mempunyai fokus kepada analisa *Belt and Road Initiative* (BRI) mengenai

[27] Artha Yudilla, "Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia," *Journal of Diplomacy and International Studies* 2, no. 1 (2019): 52–65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peluang dan ancamannya, yang merupakan salah satu persamaan dengan penelitian ini hanya saja berbeda pada studi kasusnya. Bahwa letak program *Belt and Road Initiative* (BRI) dalam penelitian ini bukan sebagai studi kasus. Namun tidak dapat dielakkan bahwa *Belt and Road Initiative* (BRI) ini masih terkait dengan studi kasus yang peneliti bawa yakni penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok.

Selanjutnya ialah skripsi, Universitas Sumatra Utara yang ditulis oleh Bunga Rahayu Sitepu pada tahun 2016, yang berjudul *"Akibat Hukum Kesepakatan Perdagangan Bilateral Anatara Indonesia dengan Jepang Terhadap Ekspor Produk Manufaktur Indonesia"*. Dalam skripsi ini dijeskan mengenai bagaimana kedudukan perjanjian yang telah dibuat untuk perdagangan bilateral di dalam skema perdagangan multilateral, serta pandangan hukum dari perjanjian perdagangan bilateral Indonesia-Jepang, dan dampaknya terhadap ekspor produk manufaktur Indonesia.[28] Skripsi tersebut mengangkat fokus kesepakatan perdagangan antara Indonesia-Jepang yang kemudian untuk dianalisis dampaknya yang artinya dampak adalah hasil yang didapat dari perdagangan tersebut baik itu dampak positif maupun negatif. Yang berarti kepentingan Indonesia telah tercapai sebagaimana dampaknya telah dirasakan. Skripsi tersebut dapat membantu

[28] Bunga Rahayu Sitepu, "*Akibat Hukum Kesepakatan Perdagangan Bilateral Anatara Indonesia dengan Jepang Terhadap Ekspor Produk Manufaktur Indonesia"2016 Universitas Sumatra Utara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti dalam menganalisis kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam melakukan kerja sama perdagangan.

Selanjutnya merupakan artikel Kementerian Perdagangan, ditulis oleh Septika Tri Ardiyanti tahun 2015, dengan judul *"Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia Jepang Terhadap Kinerja perdagangan Bilateral."* Dalam artikel ini dijelaskan mengenai akibat dari kesepakatan *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap perdagangan bilateral Indonesia dengan Jepang yang dilihat baik dari sektor ekspor dan impor. Dimana hasil dari analisis memperlihatkan bahwasanya *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan signifikan dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Jepang, namun untuk sektor impor adalah kebalikannya yaitu tidak berdampak signifikan. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan sector ekspor impor melalui kerja sama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).[29] Memiliki kemiripan pada skema proses perdagangan bilateral dalam suatu kerangka kesepakatan yakni IJEPA. Sehingga alur penelitian seperti apakah dampak yang terjadi dengan adanya kesepakatan tersebut, yang dapat diartikan sebagai tercapai atau tidaknya kepentingan yang dimiliki negara masing-masing.

Selanjutnya merupakan artikel kajian Lembaga Ketahanan Nasional RI, yang ditulis oleh Sindy Yulia Putri dan Dairatul Ma'arif pada

[29] Septika Tri Ardiyanti, "Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral," *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 9, no. 2 (2015): 129–51, https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2019, yang berjudul *"Kerja sama Ekonomi Politik Indonesia dan China Pada Implementasi Program Belt and Road Initiative"*. Pada artikel ini membahas mengenai kebangkitan China menjadi negara *super power* melalui program *belt and road initiative* (BRI) melalui program tersebut menjadikan Indonesia-Tiongkok memiliki hubungan yang lebih erat dari sebelumnya baik dalam hal perdagangan, investasi, pariwisata dan pendidikan maupun budaya.[30] Sama seperti studi pustaka kelima hanya saja pada jurnal ini penelitiannya lebih spesifik kepada sistematika dan perkembangan program *Belt and Road Initiative.*

Selanjutnya ialah skripsi Hubungan Internasional Universitas Jember, ditulis oleh Robby Hidayat pada tahun 2010, yang berjudul *"Kerja sama perdagangan Indonesia dengan China melalui ACFTA"* dalam skripsi ini dijelaskan mengenai kerja sama perdagangan yang dimiliki Indonesia dengan China pada tahun 2004-2010. Dengan analisis mendalam mengenai definisi konsep dan juga proses kerja *free trade* antar negara anggota ASEAN dengan China.[31] Skripsi tersebut memiliki studi kasus yang sama seperti pada studi pustaka kedua. Hanya saja skripsi tersebut lebih terfokus dengan memiliki rentang waktu tahun penelitian.

---

[30] Sindy Yulia Putri and Dairatul Maarif, "Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia Dan Cina Pada Implementasi Program Belt and Road Initiative," *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 7, no. 3 (2019): 53–66.

[31] Robby Hidayat, "Kerjasama Perdagangan Indonesia Dengan China Melalui ACFTA (ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA) Kerjasama Perdagangan Indonesia Dengan China Melalui ACFTA (ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA)," 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang terakhir merupakan artikel fakultas ekonomi yang ditulis oleh Sugiarti Ningsih pada tahun 2020 yang berjudul *"Analisis Faktor-Faktor Makro yang Berpengaruh Terhadap Perdagangan Indonesia dengan China Dalam Usaha Merespon Pasar Bebas Tahun 2020"* pada jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana suku bunga dan cadangan devisa suatu negara dapat mempengaruhi aktifitas ekspor impor negara tersebut, yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori perdagangan internasional.[32] Pada jurnal tersebut lebih menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data. Namun memiliki fokus analisis kepada faktor makro merupakan letak istimewanya dimana dalam jurnal tersebut menganalisis bagaimana seperti suku bunga dan cadangan devisa mempengaruhi aktifitas perdagangan Indonesia-Tiongkok, yang dapat membantu untuk pengembangan penelitian dalam skripsi peneliti

F. ARGUMENTASI UTAMA

Pada penelitian yang berjudul "Kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok dalam perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement*.", Peneliti memiliki argumentasi bahwa Indonesia melakukan perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok dikarenakan status yang dimiliki oleh Tiongkok sebagai mitra dagang utama Indonesia. Untuk itu, analisis mendalam mengenai latar belakang kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia akan dilakukan peneliti

[32] Sugiarti Ningsih, *Analisis Faktor-Faktor Makro yang Berpengaruh Terhadap Perdagangan Indonesia dengan China Dalam Usaha Merespon Pasar Bebas Tahun 2020*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

guna mendapatkan kejelasan mengenai argumentasi yang telah peneliti utarakan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Berikut adalah sistematika pembahasan pada setiap bab dari judul penelitian Kepentingan Indonesia terhadap Tiongkok dalam perdagangan bilateral menggunakan *Local Currency Settlement*:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I yaitu pendahuluan, yang merupakan pondasi dari penelitian ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, argumentasi utama, dan terakhir sistematika penulisan. Pada bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian dan juga gambaran awal mengenai masalah yang diangkat oleh peneliti.

2. BAB II KAJIAN KONSEPTUAL

Pada bab II kajian konseptual, peneliti menjelaskan definisi konseptual dan kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti, untuk definisi konseptualnya yakni: perdagangan bilateral dan *Local Currency Settlement,* dan kepentingan nasional sedangkan untuk kerangka teorinya yakni: teori pilihan rasional. Konsep tersebut akan digunakan peneliti sebagai pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada bab III ialah metodologi penelitian, ini berisi metodologi penelitian yang diusung oleh peneliti. Yang terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, tingkat analisa, tahapan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisa data.

4. **BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab IV penyajian dan analisa data, pada bab ini, peneliti akan menuliskan data-data yang telah dikumpulkan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis topik penelitian. Dalam bab ini juga akan menjawab tentang rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan dengan berlandaskan konsep teori dan sekaligus menganalisis rumusan masalah tersebut sehingga didapatkan hasil yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

5. **BAB V PENUTUP**

Pada bab penutup, peneliti menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapatkan serta memberikan saran bagi pihak terkait mengenai fokus penelitian dan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KERANGKA BERFIKIR

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menerapkan beberapa konsep guna membantu dalam proses menganalisis alasan mengapa Indonesia menyepakati *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok. Sehingga dapat membantu dan mempermudah peneliti dalam proses interpretasi data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dianalisis yang kemudian nantinya akan didapatkan kesimpulan dan juga dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep perdagangan bilateral, *local currency settlement*, kepentingan nasional dan teori pilihan rasional menurut Duncan Snidal.

A. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perdagangan Bilateral

Perdagangan pada dasarnya berlaku hukum ekonomi dasar (*ceteris paribus* atau *supply and demand*), dimana jika terjadi *over supply* terhadap apapun baik barang atau sumber daya akan terjadi penurunan harga. Begitupula sebaliknya apabila terjadi *over demand* terhadap barang ataupun sumber daya maka akan terjadi kenaikan harga. Hal tersebut juga berlaku pada bentuk komoditi mata uang. Semakin tinggi kebutuhan terhadap suatu mata uang maka akan semakin besar nilai mata uang tersebut, sebaliknya jika semakin rendah kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mata uang itu, maka akan menurunkan nilai mata uang tersebut. Dimana hal itu juga terjadi diantara Rupiah dengan Dolar AS, apabila kebutuhan terhadap Dolar AS tinggi maka nilai Rupiah terhadap Dolar AS akan turun begitu pula sebaliknya[33]

Guna memenuhi kebutuhan suatu negara, dibutuhkan terjalinnya hubungan dengan negara lain. Hubungan tersebut dapat berupa kerja sama dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi politik dan keamanan. Karena pada dasarnya suatu negara saling membutuhkan satu sama lain untuk menutupi kekurangan masing-masing. Begitu pula dalam rangka mememnuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri, dibutuhkan kerja sama perdagangan dengan negara lain. Baik kerja sama perdagangan multilateral maupun bilateral. [34] Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan konsep perdagangan bilateral.

Perdagangan bilateral merupakan perjanjian kerja sama internasional dimana negara yang menjadi peserta dan terkait dalam perjanjian tersebut hanya berjumlah dua negara saja.[35] Terbentuknya perdagangan bilateral umumnya di latar belakangi oleh suatu perjanjian kerja sama antar kedua negara. Sementara mengenai konteks perdagangan bilateral dalam penelitian ini ialah aktifitas perdagangan

[33] Posma Sariguna Johnson Kennedy, "Modul Ekonomi Mikro Pasar," *Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia*, 2017, 1–29.

[34] Bunga Rahayu Sitepu, "Akibat Hukum Kesepakatan Perdagangan Bilateral Indonesia dengan Jepang Terhadap ekspor Produk Manufaktur Indonesia," (Skripsi, Universitas Sumatra Utara, 2016)

[35] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Indonesia dengan Tiongkok, dilakukan dengan ekspor-impor suatu produk, hingga perdagangan jasa dan investasi dengan menggunakan *Local Currency Settlement*.

2. *Local Currency Settlement* (LCS)

Seperti yang telah peneliti jelaskan secara singkat pada bagian latar belakang. Dalam penelitian ini, perdagangan bilateral dilakukan oleh Indonesia dengan Tiongkok dengan menggunakan *Local Currency Settlement* (LCS) dimana *settlement* transaksinya dilakukan di yuridiksi wilayah negara masing-masing dengan kuotasi nilai tukar secara langsung (*direct quotation*) tanpa menggunakan acuan Dolar AS. Dimana Indonesia dan Tiongkok melalui Bank Indonesia (BI) dan *People Bank of China* (PBoC) menunjuk Bank ACCD (*Appointed Cross Currency Dealer*) guna memfasilitasi pelaksanakan transaksi menggunakan mata uang lokal.[36] Dengan diterapkannya kesepakatan tersebut diharapkan mampu mendorong laju perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Tiongkok.

3. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional ialah bentuk dari tujuan yang hendak digapai oleh setiap negara berdaulat. Dalam menggapai kepentingan nasional, negara berperan sebagai aktor yang membuat keputusan serta berperan krusial dalam lingkungan internasional yang

[36] Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempengaruhi kehidupan dalam negerinya. Karena pada dasarnya kepentingan nasional merujuk kepada tujuan serta cita-cita negara yang hendak dicapai oleh sebuah negara yang memiliki lingkup relatif sama diantara negara satu dan yang lainnya, ialah keamanan dan kesejahteraan. Walaupun begitu, setiap negara pasti mempunyai kepentingan yang berbeda menyesuaikan dengan situasi negara yang bersangkutan.[37]

Kepentingan nasional yang dimiliki oleh suatu negara sering dijadikan sebagai tolak ukur bagi para pengambil keputusan setiap negara sebelum menentukan dan melaksanakan sebuah tindakan. Terlebih setiap saat negara mengeluarkan kebijakan luar negeri, pasti didasarkan pada kepentingan nasional negara yang ditujukan untuk memenuhi hal-hal yang dikategorikan dan ditetapkan sebagai suatu kepentingan nasional.[38]

Kepentingan nasional atau *national interest* merupakan setiap bentuk politik luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara berdasarkan pada suatu kepentingan yang sifatnya relatif sama satu sama lain, diantaranya ialah kepentingan politik, ekonomi dan keamanan nasional.[39] Dalam konteks penelitian ini yang lebih

---

[37] D I Suriah, "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Perubahan Kebijakan Penempatan Pasukan Militernya Di Suriah Pajriansyah 1" 8, no. 4 (2020): 497–506.

[38] Teuku May Rudy, "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin," Universitas Indonesia Library (Rafika Aditama, 2002), http://lib.ui.ac.id.

[39] Agita Suryadi and Pazli ", "Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi Dengan Slovakia Dalam Bidang Energi Dan Infrastruktur," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 2 (September 23, 2015): 1–15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas mengenai perdagangan, konsep kepentingan nasional disini lebih menggunakan perspektif liberalisme dimana dalam konsep tersebut kepentingan nasional terletak pada stabilitas ekonomi dan kondisi pasar dari suatu negara. Menurut Scott Burchill dalam bukunya *Theories of International Relations,* perspektif liberalisme memiliki tujuan ialah berjalannya perekonomian dengan baik dan sistematis sehingga individu di dalam negara tersebut dapat leluasa dalam melakukan aktifitas ekonomi dan perdagangan.[40] Atas dasar tersebut maka kepentingan nasional merupakan sesuatu yang mutlak dan sudah pasti dimiliki oleh setiap negara. Kepentingan nasional juga erat kaitannya dengan kekuatan negara yang dijadikan sebagai tujuan atau instrumen.[41] Donald E Nuetcherlin menjelaskan mengnai kepentingan nasional ialah kebutuhan serta keinginan yang hendak digapai oleh negara yang berdaulat melalui pemanfaatan hubungan yang dimiliki dengan negara berdaulat lain yang merupakan lingkunan eksternal negara yang bersangkutan.[42]

[40] Scott Burchill, ed., *Theories of International Relations*, 3rd ed (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005).

[41] Arry Bainus and Junita Budi Rachman, "Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional," *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 109, https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1.

[42] Donald E. Nuechterlein, "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making," *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (1976): 246–66, https://doi.org/10.1017/S0260210500116729.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. KERANGKA TEORITIK: TEORI PILIHAN RASIONAL MENURUT DUNCAN SNIDAL

Rational choice theory atau teori pilihan rasional merupakan proses pembuatan keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan pilihan rasional dan yang terbaik guna dapat mencapai keuntungan yang maksimal. James S Coleman menjelaskan mengenai konsep dari *rational choice,* yang menurutnya teori tersebut berangkat atas dasar dua faktor, yaitu aktor dan sumber daya. Aktor tersebut dapat berupa korporat atau kelompok maupun individu yang mempunyai peran penting dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk kemudian dimaksimalkan fungsinya terhadap pihak yang sedang mencari sumber daya, dengan kata lain aktor memegang kontrol penting dalam memanajemen sumber daya untuk dikelola demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.[43]

Dalam proses pembuatan keputusan, James S Coleman membedakannya menjadi dua level kategori yaitu makro dan mikro[44] dimana kedua level tersebut mempunyai aktor dan sumber daya yang berbeda pula. Pada level mikro pembuatan keputusan terfokus kepada ruang lingkup masyarakat maupun individu dan biasanya cenderung pada pola perilaku kolektif. Sedangkan level makro mencakup lingkup yang lebih luas yaitu lingkup global yang meliputi hubungan antar

[43] George Ritzer, *Sociological Theory*, 8th ed (New York: McGraw-Hill, 2011).
[44] "Rational and Society (Short), James S. Coleman.Pdf," n.d.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara.[45] Dalam konteks penelitian ini, level yang digunakan ialah level makro, untuk menjelaskan bagaimana suatu keputusan dibuat, dan atas dasar tujuan atau kepentingan apa yang dimiliki oleh suatu negara.

Dijelaskan oleh Duncan Snidal, *Rational choice theory* biasanya dipandang sebagai pendekatan dan metodologi yang menjelaskan mengenai suatu kebijakan baik yang berasal dari individu maupun social kolektif atau perilaku kolektif dalam rangka mencapai suatu kepentingan.[46] Seperti halnya yang terjadi dalam lingkup makro, yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi sesuai bidangnya masing-masing. Negara merupakan asosiasi yang mana bergerak berdasarkan hukum yang dibuat oleh pemerintahan negara tersebut guna mengatur keberlangsungan kehidupan negara yang bersifat memaksa.[47] Serta hubungan yang terjadi diantara negara-negara merupakan objek yang dijadikan kajian penelitian. Dimana negara merupakan aktor utama dalam Hubungan Internasional[48] Dari penjelasan diatas tersebut dapat diketahui bahwa individu atau pejabat negara maupun lembaga yang terdiri atas beberapa pejabat negara, yang melakukan tindakan atas nama negara merupakan bentuk daripada keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Hal tersebut

[45] Suka Arjawa, "Pilihan Rasional Di Balik Pembebasan Corby," *Global & Strategis* 8, no. 1 (2014): 49–62.

[46] Walter Carlsnaes, Thomas Risse-Kappen, and Beth A. Simmons, eds., *Handbook of International Relations*, Second edition (Los Angeles: SAGE, 2013).

[47] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2003).

[48] Suka Arjawa, "Pilihan Rasional Di Balik Pembebasan Corby," *Global & Strategis* 8, no. 1 (2014): 49–62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut perilaku kolektif yang biasanya dilakukan dalam rangka menentukan pilihan rasional.[49]

Dengan kata lain, perilaku kolektif disini terjadi dalam badan pemerintahan suatu negara dimana pemerintah adalah aktor yang berperan aktif sebagai pembuat keputusan dan kebijakan negara. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah umumnya merupakan keputusan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan spesifikasi masing-masing dalam badan pemerintahan suatu negara untuk kemudian dikolaborasikan sehingga dapat menjadi daya tawar kepada negara lain.[50] Maka untuk mendapatkan jawaban dari suatu kebijakan negara, diperlukan suatu penafsiran terhadap keputusan tersebut salah satunya dengan menggunakan *rational choice theory*, yang berangkat melalui kejadian-kejadian yang dialami oleh negara yang bersangkutan.[51]

Dijelaskan pula oleh James S Coleman bahwa *rational choice theory* dapat bekerja dengan setidaknya terdapat pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh aktor berdasarkan sumber daya yang tersedia. Dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan untuk

---

[49] George Ritzer, *Sociological Theory*, 8th ed (New York: McGraw-Hill, 2011).

[50] Walter Carlsnaes, Thomas Risse-Kappen, and Beth A. Simmons, eds., *Handbook of International Relations*, Second edition (Los Angeles: SAGE, 2013).

[51] Suka Arjawa, "Pilihan Rasional Di Balik Pembebasan Corby," *Global & Strategis* 8, no. 1 (2014): 49–62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keputusan yang terbaik.[52] Dijelaskan oleh K. J. Holsti dalam jurnal Suka Arjawa bahwa *rational choice theory* dapat digunakan untuk mengetahui alasan negara dalam melakukan kebijakan politik luar negeri tertentu, dimana menurut Holsti politik luar negeri suatu negara adalah kepanjangan atau proses output dari kebijakan dalam negerinya.[53]

[52] George Ritzer, *Sociological Theory*, 8th ed (New York: McGraw-Hill, 2011).

[53] Suka Arjawa, "Pilihan Rasional Di Balik Pembebasan Corby," *Global & Strategis* 8, no. 1 (2014): 49–62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan di penelitian ini yaitu, penelitian kualitatif dan eksplanatif. Menurut John C. King "penelitian kualitatif sebagai teknik penelitian yang intuitif dan sistematis untuk membantu seorang peneliti menghasilkan pengetahuan dengan cara yang efisien dan koheren".[54] Analisis penelitian kualitatif didapatkan dari data-data yang dihimpun oleh peneliti, baik itu berasal dari buku, jurnal, ataupun artikel berita dan diolah dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk memperkuat hasil analisis yang didapat dari data-data tersebut.

Pada penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna serta pemahaman dan penalaran dari dalam diri peneliti guna mendefinisikan suatu situasi atau fenomena tertentu. Selain itu, pendekatan kualitatif lebih menekankan kepada proses daripada hasil akhir.[55] Pendekatan penelitian disini digunakan oleh peneliti dengan tujuan penelitian yang tidak memiliki berbedaan tujuan terhadap penelitian-penelitian lain, yaitu menjelajah (eksploratif), atau menggambarkan (deskripsi), ataupun juga menjelaskan

[54] "Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional / Dr. Umar Suryadi Bakry | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," accessed October 14, 2021, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144315.

[55] Mohammad Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2011): 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(eksplanatif). Disini peneliti menggunakan Penelitian eksplanatif untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari suatu kejadian atau peristiwa. Nan Lin dalam *Foundations of Social Research* menyebut pendekatan eksplorasi, deskripsi, dan eksplanasi sebagai tipe studi. Maka dari itu, dalam memilih tipe penelitian apakah menggunakan jenis eksploratif, deskriptif, ataupun eksplanatif merupakan bentuk dari metode pemecahan masalah yang tergantung pada inti dari masalah dalam penelitian, tersedianya data, dan tingkat pengetahuan mengenai masalah atau topik yang diteliti.[56]

Penelitian jenis eksplanatif melakukan kajian terhadap hubungan sebab dan akibat antar dua fenomena atau lebih. Penelitian eksplanatif biasanya digunakan guna mendapatkan suatu penjelasan apakah suatu penjelasan atau keterkaitan mengenai sebab dan akibat dalam suatu fenomena atau peristiwa itu dapat dikatakan valid atau tidak, ataupun juga dapat mengetahui diantara fenomena atau peristiwa mana yang lebih unggul dalam keabsahan data diantara dua atau lebih eksplanasi atau penjelasan yang tersedia.[57] Menurut Sugiyono penelitian eksplanatif merupakan penelitian yang menjelaskan mengenai kedudukan antar variabel yang diteliti serta hubungan yang terdapat diantara variable-variabel yang diteliti berdasarkan argumentasi utama yang telah dirumuskan.[58]

---

[56] Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 1 (2018): 65, https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220105.

[57] Mulyadi, "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2011): 128.

[58] "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," accessed October 14, 2021, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. LOKASI DAN WAKTU

Lokasi penelitian akan dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa situs, seperti Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia, yang tersedia secara digital melalui website resmi serta perpustakaan digital Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sementara untuk waktu penelitian dimulai pada awal bulan April 2021 sejak proposal penelitian telah diterima hingga selesai.

C. TINGKAT ANALISIS DATA

Dalam melakukan kegiatan analisa data, peneliti perlu untuk menentukan variabel dependen (variable terikat) sebagai unit analisa dan variabel independen (variable bebas) sebagai unit eksplanasi sebelum memulai sebuah penelitian.[59] Dalam penelitian ini variable dependen ialah "*Local Currency Settlement*" sedangkan untuk independennya "Perdagangan Bilateral." Kemudian, unit analisis Menurut Mochtar Mas'oed, yaitu objek yang perilakunya hendak dianalisis dan dijelaskan.[60] Terdapat empat macam level analisis dalam Hubungan Internasional, yakni level individu, kelompok, level negara, dan sistem.[61] Dalam penelitian ini

[59] "Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional / Dr. Umar Suryadi Bakry | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

[60] Mochtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," 1990.

[61] Carmen Gebhard "Student Feature – Levels of Analysis," *E-International Relations*, February 25, 2018, https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unit analisis yang digunakan peneliti berdasarkan pengertian tersebut ialah tingkat analisa negara yaitu Indonesia.

D. TAHAPAN PENELITIAN

1. Tahap persiapan

Pada tahap ini, peneliti awali dengan menyiapkan pertanyaan yang sesuai terhadap rumusan masalah dari topik penelitian yang diambil, yaitu: Apa kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia dalam menyepakati kerja sama perdagangan bilateral dengan Tiongkok menggunakan *Local Currency Settlement*

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti akan awali dengan proses pengumpulan data, seperti: melakukan studi literatur dengan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, maupun artikel yang menyesuaikan dengan topik yang diangkat oleh peneliti.

3. Tahap analisis data

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik analisis yang biasa dipakai dalam analisis kualitatif, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Untuk metode pengumpulan data, peneliti memakai metode kualitatif yakni dengan melakukan dokumentasi dan studi pustaka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dokumen adalah cacatan peristiwa lampau yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk lisan, gambar, tulisan, maupun karya dari seseorang.[62] Teknik ini bekerja dengan mengumpulkan data berupa dokumentasi yang diambil dari jurnal, karya ilmiah, laporan-laporan, berita-berita dan lain sebagainya. Metode ini dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam bentuk dokumen yang berasal berbagai sumber.

5. TEKNIK ANALISA DATA

Menurut Robert Bogdan analisa data adalah menyusun data secara sistematis lalu mengorganisasikan data kemdian menjabarkannya ke dalam unit serta berusaha menemukan pola dari data tersebut, memilih mana yang penting dan akan dilanjutkan, terakhir membuat kesimpulan untuk dituliskan.[63] Aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif serta berlangsung secara terus menerus sampai selesai.[64] Mathew B. Miles dan Michael Huberman mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam analisa data penelitian yaitu:

1. Reduksi data, dimana pada tahapan ini peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya untuk kemudian selanjutnya dilakukan pemilahan data sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

[62] "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

[63] Robert C. BOGDAN, *Qualitative Research for Education* (Allyn and Bacon, 1982).

[64] Mathew B. Miles dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyajian data, dimana pada tahapan ini peneliti melakukan penyusunan data baik dalam bentuk naratif maupun tabel supaya dapat lebih mudah dipahamai oleh pembaca

3. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan, berisi hasil analisis yang berupa jawaban mengenai rumusan masalah secara detail dan jelas mengenai topik yang diangkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Sejarah dan Perkembangan Hubungan Perdagangan Indonesia-Tiongkok

Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok dalam sejarahnya telah berlangsung sejak lama bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Banyak berbagai macam bentuk perjanjian yang telah dicapai antar kedua negara baik pada pra kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan Indonesia. Perdagangan merupakan salah satu pemicu utama hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok, dikarenakan pada posisi strategis Nusantara (Indonesia sebelum merdeka) yang terletak di jalur perdagangan utama dunia pada masa itu serta didukung dengan kekayaan akan rempah-rempah menjadikan banyak bangsa bangsa luar tertarik untuk berdagang di Nusantara tidak hanya bangsa Tiongkok saja. Setelah resmi merdeka pun hubungan terus terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok melewati berbagai macam masa kepemimpinan dari era Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno hingga saat ini Joko Widodo.[65] Untuk sejarah perdagangan Indonesia-Tiongkok ini peneliti akan membaginya menjadi empat poin yakni pra kemerdekaan, era orde lama, orde baru, dan reformasi.

[65] Dutha Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia," 2017, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hubungan Indonesia-Tiongkok Era Pra-Kemerdekaan

Hubungan Indonesia-Tiongkok apabila di telusuri telah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu atau sekitar 2000 tahun yang lalu yang telah tercatat dalam kronik Dinasti Han (202-220 SM) pada masa itu bangsa Tiongkok menyebut Nusantara dengan Huang-Tse.[66] Kedekatan hubungan kedua negara diketahui melalui kedatangan etnis yang berasal dari Tiongkok menuju ke Indonesia, dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti artefak, dsb yang diketahui merupakan peninggalan kerajaan-kerajaan kuno Indonesia yang mempunyai keterkaitan dengan bangsa Tiongkok.[67]

Dalam meninjau sejarah hubungan yang dimiliki oleh Nusantara dengan Tiongkok, Victor Purcell dalam *The Chinese in South East Asia* menyatakan bahwa proses kedatangan bangsa Tiongkok ke Nusantara terbagi menjadi tiga tahapan yakni, pada masa kerajaan, masa invasi bangsa Eropa, dan masa kolonialisme oleh Belanda.[68] **Pertama**, pada tahap masa kerajaan dimana pada masa ini Nusantara banyak berdiri kerajaan-kerajaan dipimpin oleh seorang Raja atau Sultan. Pada mulanya, jumlah pendatang dari Tiongkok masih sangat sedikit dan belum terbentuk sebagai satuan komunitas yang dikenal sebagai Tionghoa. Awal mula dari migrasi bangsa Tiongkok ke Nusantara dapat ditelusuri melalui masa Dinasti Han (206 SM – 220 M).

---

[66] Zhang Xing and Tansen Sen, "The Chinese in South Asia," *Routledge Handbook of the Chinese Diaspora*, 2013, 205–26, https://doi.org/10.4324/9780203100387.ch13.

[67] Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia."

[68] Alifi Nur Prasetia Nugroho and Rini Riris Setyowati, "Adikuasa Perdagangan Tiongkok: Tiongkok Dalam Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia (Tinjauan Sejarah Sosial-Ekonomi Pedagang Tiongkok Di Indonesia)," *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 15, no. 2 (October 1, 2019), https://doi.org/10.21831/istoria.v15i2.27292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut catatan, pada saat itu Tiongkok telah banyak menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara, selain itu juga sudah ada yang datang ke Pulau Jawa.[69] Selain itu, berdasarkan kronik dari Dinasti Han, hubungan resmi yang terjalin antara Tiongkok dengan Nusantara telah terjalin sejak tahun 131 SM dengan ditemukannya peninggalan asal Yunan, yang ditemukan di Sumatera Selatan.[70] Menurut Pramudya Ananata Toer mengungkapkan bahwa pada masa kerajaan tepatnya pada masa Airlangga telah ada komunitas Tiongkok di beberapa wilayah di Indonesia. yang kemudian membentuk komunitas yang hingga kini kita kenal dengan sebutan Tionghoa. pada tahapan ini disebut sebagai *Chinese follow the trade* atau kedatangan bangsa Tiongkok dalam rangka berdagang.[71]

Kemudian tahap kedua, yang terjadi setelah banyak bangsa eropa datang di wilayah Asia Tenggara dengan tujuan berdagang pada abad 17 membuat wilayah Asia Tenggara semakin ramai pendatang. Termasuk juga kedatangan dari bangsa Tiongkok yang pada saat itu dengan memanfaatkan musim angin yang notabene adalah sebagai sarana pelayaran utama pada masanya. Mereka banyak bermukim dalam jangka waktu yang pendek di sekitar wilayah pelabuhan, dimana di pelabuhan-pelabuhan tersebut mereka jadikan untuk pusat aktifitas ekonomi. Alhasil keadaan tersebut menyebabkan lebih banyak bangsa Tiongkok yang bermigrasi karena dapat menjadi peluang

---

[69] Agie Hanggara, "Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 14, no. 02 (2018), https://doi.org/10.25134/equi.v14i02.1129.

[70] "Tahu Cerita Awal Kedatangan Tionghoa Di Indonesia? Begini Sejarahnya," accessed October 14, 2021, https://www.idntimes.com/science/discovery/eka-supriyadi/sejarah-awal-kedatangan-orang-tionghoa-di-indonesia-c1c2/2.

[71] Xing and Sen, "The Chinese in South Asia."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi bangsa Tiongkok untuk membuka kesempatan dalam menjajankan barang dagangannya.

Seperti diungkap oleh sejarawan Inggris, Pater Carey dalam *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina*. Peter menjelaskan bahwa orang Tiongkok yang pada mulanya hanya berdagang barang pernak-pernik dari negeri asalanya. Namun, seiring berjalannya waktu tidak sedikit orang Tiongkok tersebut yang memutuskan untuk tinggal hingga memutuskan hidup dengan pribumi bahkan hingga memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, selama berabad-abad selanjutnya, bangsa Tiongkok atau yang pada masa ini mulai dikenal dengan sebutan Tionghoa sangat leluasa dalam memainkan perannya yang begitu penting dalam aktifitas sosial dan ekonomi bahkan hingga pedalaman kerajaan-kerajaan di Jawa.[72]

Pada tahap tiga, adalah saat Nusantara sedang berada di genggaman kolonial Belanda, dengan banyak ditemukannya pemukiman komunitas Tionghoa di banyak wilayah. Pada tahap ini diketahui bahwa komunitas Tionghoa telah menjadi sangat besar dan motivasi yang dimiliki oleh mereka tidak hanya soal kepentingan berdagang..[73] Komunitas Tionghoa sendiri telah memiliki citra khas yang kuat dalam bidang usaha dan

[72] Peter B. Carey, "Orang Cina, Bandar Tol, Candu Dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina, 1755-1825," accessed October 14, 2021, https://www.academia.edu/13785243/Orang_Cina_Bandar_Tol_Candu_dan_Perang_Jawa_Perubahan_Persepsi_tentang_Cina_1755_1825.

[73] Awal Kedatangan and Orang-orang Cina Di, "Bab 2 Awal Kedatangan Orang-Orang Cina Di Nusantara Hingga Masuk Ke Bogor 2.1 Sejarah Awal Kedatangan Orang-Orang Cina," 2009, 18–79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan yang sudah dikenal sejak lama. Oleh sebab itu, pada masa penjajahan Belanda, urusan perdagangan dan ekonomi orang Tionghoa menguasai sebesar 35,4 % ekonomi Indonesia, melebihi dari yang dimiliki oleh bangsa pribumi bahkan bangsa Eropa. Hal tersebut terjadi dikarenakan kebijakan dari pemerintah Belanda yang tidak memperbolehkan orang Tionghoa untuk mempunyai tanah serta juga tidak diizinkan untuk menjadi pegawai negeri dikarenakan jabatan tersebut hanya untuk golongan kaum Eropa dan bangsawan pribumi.[74] Sehingga menyebabkan orang-orang Tionghoa untuk mencari jalan keluar sendiri dengan memfokuskan diri mereka menjadi seorang pedagang, yaitu bidang usaha yang memang mereka diizinkan atau tidak dilarang oleh pemerintah Belanda.

2. Hubungan Indonesia Tiongkok Era Orde Lama

Setelah era kolonial berakhir, hubungan yang dimiliki Indonesia dengan Tiongkok akhirnya mencapai pada fase berikutnya dimana terjadi setelah Indonesia telah menjadi negara yang merdeka. Pada periode orde lama sendiri hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok terlaksana pada rentang waktu 1950 hingga 1967 sebelum pembekuan hubungan bilateral oleh presiden Soeharto.[75] Secara resmi hubungan Indonesia-Tiongkok sudah terjalin sejak tahun 1950. Yang mana saat itu Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan mengakui berdirinya Tiongkok baru, yang menganut ideologi komunis. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia juga mengirim Duta

[74] *Ibid*

[75] Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besar Indonesia untuk Tiongkok yang bernama Arnold Mononutu, yang mana hal tersebut menandai awal mula eratnya hubungan yang dimiliki antara Indonesia dengan Tiongkok. Hubungan kerja sama antar kedua negara terus terjalin dengan baik dimana pada akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1955 saat Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan hadirnya perdana Menteri Tiongkok yaitu Zhou En Lai beserta delegasinya. [76]

Kemudian hubungan baik tersebut dilanjut dengan kunjungan kenegaraan oleh Presiden pertama Republik Indonesia Ir.Soekarno ke Tiongkok pada tahun 1956. Pada tahun 1957, hubungan yang dimiliki antar kedua negara dalam bidang perdagangan juga mengalami peningkatan, ditambah Indonesia dan Tiongkok pada masa itu telah mulai membangun hubungan saling mendukung serta kerja sama dalam berbagai macam bidang dan urusan di kancah internasional. Perdagangan merupakan bidang utama yang menjadi bentuk kerja sama Indonesia-Tiongkok. Salah satu komoditas perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok ialah ekpor karet oleh Indonesia. Pelaksanaan perdagangan karet yang dilakukan pada tahun 1956, yang juga merupakan bentuk usaha dari normalisasi perdagangan internasional, dimana sebelumnya terdapat kebijakan dari *United Nations* (UN) mengenai penghapusan embargo karet.[77] Era Presiden Soekarno disebut sebagai pondasi awal hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dengan Tiongkok. Tidak dapat dipungkiri memang bahwa pada saat itu, hubungan

[76] *Ibid*

[77] Duta Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia." 2017, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua negara antara Indonesia dengan Tiongkok sedang dalam masa bulan madunya dikarenakan hubungan diplomatik yang terjalin masih terbilang cukup baru bahkan hingga pertukaran dan interaksi tidak hanya terjadi di kalangan kelas atas melainkan juga terjadi di kalangan-kalangan bawah.[78]

Namun, diakhir dari kepemimpinan Presiden Soekarno hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Tiongkok mengalami keretakan disebabkan ulah Partai Komunis Indonesia (PKI). Dikarenakan merasa mendapat dukungan penuh dari Presiden Soekarno, PKI semakin melunjak dengan ditunjukkannya upaya mereka untuk membentuk angkatan kelima yang secara tegas ditolak oleh pihak militer yang menganggapnya sebagai uapaya untuk melemahkan peran militer di Indonesia. Dengan begitu, dimulailah pertikaian antara PKI dengan militer. Puncaknya ialah terjadinya peristiwa G30SPKI 1965, yaitu suatu usaha perebutan kekuasaan oleh PKI yang gagal terhadap pemerintahan Indonesia. Dimana dalam peristiwa tersebut Tiongkok dianggap mempunyai peran besar dalam membantu rencana perebutan kekuasaan oleh PKI. [79]

3. Hubungan Indonesia-Tiongkok Era Orde Baru

Setelah Indonesia berada dibawah rezim pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh mantan Jenderal Besar TNI Republik Indonesia yakni Presiden Soeharto mengirimkan sebuah memorandum melalui departemen luar negeri ke Tiongkok yang isinya menyatakan bahwa pemerintahan Indonesia dengan

[78] *Ibid*

[79] Hafid Adim Pradana, "Persepsi Suharto Dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina Pada Awal Orde Baru," *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (2016): 23–42, https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resmi membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok terhitung mulai 30 Oktober 1967. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Tiongkok tersebut merupakan buntut dari peristiwa pemberontakan "Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30SPKI). Setelah berjalannya pemerintahan rezim orde baru oleh Presiden Soeharto, dimana dalam menjalankan pemerintahan Presiden Soeharto lebih memilih untuk berfokus kepada perbaikan dan perkembangan ekonomi. Dalam menempuh tujuan tersebut, Presiden Soeharto dalam struktur pemerintahannya banyak didominasi oleh militer serta lebih berkiblat pada Barat. [80]

Pada saat itu, Presiden Soeharto menganggap Tiongkok sebagai sebuah ancaman dikarenakan ideologi komunis yang dianut. Dalam mengantisipasi tumbuhnya pengaruh komunis dalam tubuh pemerintahannya, dengan tegas Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik yang terjalin dengan Tiongkok.[81] Setelah pembekuan hubungan Indonesia dengan Tiongkok selama kurang lebih 23 tahun Presiden Soeharto pada akhirnya memutuskan untuk mencoba menhidupkan kembali hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok. Awal mula hubungan kedua negara tersebut kembali hidup yaitu ketika Presiden Soeharto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen, pada 24 Februari 1989.[82] Dari pertemuan tersebut, dilanjutkan dengan pembahasan normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok dengan diutusnya Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas oleh

[80] *Ibid*
[81] *Ibid*
[82] Duta Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia." 2017, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Presiden Soeharto untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen pada 4 Oktober 1989 di Tokyo.[83] Setelah pertemuan oleh kedua negara yang dihadiri oleh masing-masing Meneteri Luar Negeri tersebut, Perdana Menetri Tiongkok Li Peng melakukan kunjungan ke Indonesia dan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman bahwa hubungan diplomatik antar kedua negara telah pulih kembali pada 8 Agustus 1990 setelah sekian lama dilakukan pembekuan.[84] Keberhasilan pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok tersebut tak terlepas dari faktor ekonomi perdagangan dan Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1988 yang dengan terlampir bahwa dalam upaya pengembangan ekspor non migas, Indonesia perlu untuk mencari peluang pasar baru guna keberhasilan pengembangan ekspor komoditas non migas.[85]

Sejak pemulihan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Tiongkok pada 1990, diketahui bahwa volume perdagangan Indonesia-Tiongkok juga turut mengalami peningkatan cukup signifikan. Dimana tercatat pada 1990 sebesar 1.486,73 juta Dolar AS, yang kemudian melonjak menjadi 3.236,94 juta Dolar AS pada 1995. Barang yang menjadi komoditas ekspor Indonesia ke Tiongkok tersebut antara lain seperti kayu olahan, minyak sawit, pupuk, karet, serta bahan bangunan seperti besi beton dan semen, adapula komoditas impor Indonesia dari Tiongkok yang banyak berupa barang modal. Sementara itu dibidang investasi, tercatat sejak

[83] *Ibid*
[84] *Ibid*
[85] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemulihan hubungan diplomatik hingga Juli 1996 Tiongkok melakukan investasi di Indonesia sebesar 186,06 juta dolar AS yang bergerak di bidang industri kimia, mineral non logam hingga bangunan. Begitu pula sebaliknya, melalui para pengusaha di Indonesia, tercatat sekitar 200 juta dolar AS investasi Indonesia atas Tiongkok.[86]

Dalam upaya pemulihan hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok, pada saat itu Indonesia melakukan mobilisasi terhadap *National Development Center* (NDC), guna mengumpulkan modal dari pengusaha-pengusaha Tiongkok untuk kelangsungan pembangunan nasional.[87] Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia telah melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan Tiongkok yang diawali di sektor perdagangan. Yang artinya Indonesia juga sekaligus membangun hubungan diplomatik dengan Tiongkok dalam hal menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk lebih meningkatkan investasi antar kedua negara.[88] Bagi Indonesia sendiri, adanya pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok ini menjadi sangat penting, terutama setelah Indonesia terkena dampak dari krisis finansial Asia pada 1997.[89]

4. Hubungan Indonesia Tiongkok Era Reformasi-Sekarang

Setelah berakhirnya era orde baru terbitlah era reformasi yang dimulai setelah Presiden Soeharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh Prof. Dr.

---

[86] "Volume Perdagangan Indonesia-China Terus Meningkat," *HM Soeharto* (blog), November 25, 2019, https://soeharto.co/volume-perdagangan-indonesia-china-terus-meningkat/.

[87] Duta Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia." 2017, 81.

[88] *Ibid*

[89] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B.J Habibie. Pada awal era reformasi yang ditandai oleh kepemimpinan Prof. Dr. B.J Habibie, dengan masa jabatan yang terbilang cukup singkat ditambah warisan situasi krisis moneter peninggalan dari Presiden Soeharto, membuat banyak permasalahan luar negeri khususnya hubungan diplomatik dengan Tiongkok kurnag mendapat perhatian. Pada kepemimpinan Presiden Habibie tidak banyak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Tiongkok. Sebuah MoU (*Memorandum of Understanding*) mengenai rencana perdagangan timbal balik antara Tiongkok dengan Indonesia yang ditandatangani di Jakarta pada 25 november 1998, yang menjadi kerangka kerja sama kedua negara, merupakan salah satu dalam bidang perdagangan dengan Tiongkok.[90] Selain itu, Presiden Habibie hanya membuat kebijakan dalam negeri seperti penghapusan istilah pribumi dan non pribumi yang terbilang cukup meresahkan bagi masyarakat Tionghoa melalui dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No 26/1998.[91]

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Prof. Dr. B.J.Habibie sebagai Presiden, diadakan rapat oleh MPR untuk membahas pengganti dari Prof. Dr. B.J.Habibie sebagai Presiden yang kemudian terpilihlah KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden selanjutnya.[92] Pada masa kepemimpinan Gus Dur beliau menerapkan kebijakan kunjungan internasional, dengan melakukan kunjungan ke lebih dari 80 negara termasuk

[90] Pradana, "Persepsi Suharto Dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina Pada Awal Orde Baru."

[91] Duta Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia." 2017, 81.

[92] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiongkok guna mendapatkan dukungan internasional terhadap Indonesia yang sedang menghadapi masalah disintegrasi bangsa, kebijakan tersebut juga dikenal sebagai diplomasi persatuan.[93] Kunjungan-kunjungan yang dilakukan Gus Dur tersebut juga dilakukan untuk menarik para investor internasional termasuk Tiongkok agar bersedia menanam investasi mereka di Indonesia guna pemulihan ekonomi Indonesia setelah diterjang krisis moneter 1998.[94] Alhasil, Tiongkok bersedia untuk memberi bantuan sebesar 5 Miliar Dolar AS dan juga memberikan kredit sebesar 200 juta Dolar AS untuk pembelian bahan makanan. Disamping itu juga telah disepakatinya kerja sama di bidang teknologi, perikanan, keuangan, wisata dan kerja sama "*Counter Trade*" (bentuk timbal balik dari perdagangan internasional) di bidang energi melalui pertukaran LNG Indonesia dengan produk dari Tiongkok.[95]

Kemudian setelah berakhirnya kepemimpinan Gus Dur, kedudukan Presiden diisi oleh Megawati Soekarno Putri. Pada awal masa kepemimpinan Presiden Megawati, beliau melakukan kunjungan ke Beijing, Tiongkok untuk melakukan kesepakatan dalam upaya peningkatan kerja sama di bidang ekonomi dan politik. Kesepakatan tersebut tercapai ditandai dengan dibukanya konsulat jenderal di beberapa daerah yakni di Tiongkok dan di Indonesia, serta dibentuknya forum energi yang merupakan wadah investasi Tiongkok di Indonesia dalam bidang energi. Alhasil perdagangan bilateral

---

[93] Kompas Cyber Media, "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Reformasi," KOMPAS.com, November 3, 2020, https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/155045169/politik-luar-negeri-indonesia-masa-reformasi.

[94] Duta Freindensan, "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia." 2017, 81.

[95] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiongkok dengan Indonesia naik cukup signifikan yaknni yang mulanya hanya 2 miliyar Dolar AS meningkat hingga 8 miliar Dolar AS begitu pula dengan investasi dari Tiongkok yang juga mengalami peningkatan sebesar 6,8 miliar Dolar AS pada tahun 2003 dari yang mulanya sebesar 282 juta Dolar AS pada tahun 1999.[96]

Selanjutnya pada pemerintahan Presiden keenam Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudoyono, hubungan dengan Tiongkok dilakukan dengan memperkuat kerja sama di bidang Industri, sumber daya manusia, dan juga energi dengan nilai mencapai lebih dari 17,4 miliar Dolar AS. Yang ditegaskan oleh pernyataan dari Presiden Tiongkok pada saat itu Hu Jiantao bahwa Tiongkok akan terus berupaya dalam mempromosikan kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, maritim dan ekonomi serta kerja sama dalam urusan regional dan internasional. Pada tahun pertamanya Presiden SBY mampu mendapatkan nilai perdagangan dengan Tiongkok mencapai 8,2 Miliar Dolar AS pada tahun 2005. Hingga pada tahun 2013 Indonesia dengan Tiongkok menjalin kesepakatan baru dalam bidang industrialisasi dan pembangunan dimana berdasarkan data Kementerian Perindustrian, nilai investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 60,2 juta Dolar AS pada tahun 2013 dari 99 proyek yang berjalan. Sedangkan nilai ekspor di bidang non-migas Indonesia ke Tiongkok mencapai 10,9 miliar Dolar AS pada tahun yang sama. Hingga pada akhir masa pemerintahan Presiden SBY nilai perdagangan antara Indonesia dengan

[96] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiongkok meningkat tajam hingga mencapai 80 miliar Dolar AS. Selain itu Presiden SBY juga mengeluarkan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang nantinya menjadi cikal bakal tergabungnya Indonesia dalam proyek Tiongkok *One Belt One Road* (OBOR).[97]

Setelah masa pemerintahan Presiden SBY usai kursi kepresidenan Indonesia diisi oleh Ir. H Joko Widodo atau yang kerap dikenal dengan Jokowi. Pada 2015, Presiden Jokowi mengadakan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk pertama kalinya, dalam kunjungannya tersebut Jokowi menyampaikan mengenai visi misi yang bersangkutan dengan hubungan Indonesia dengan Tiongkok khususnya di bidang perdagangan serta kepentingan nasional yang menyertainya.

Dibawah Kepemimpinan Jokowi, Hubungan Indonesia dengan Tiongkok menjadi semakin mesra. Setelah Indonesia tergabung dalam proyek besar Tiongkok yaitu *Belt and Road Initiative* (BRI) banyak kerja sama dibidang lain menyusul untuk disepakati khususnya dibidang perdagangan dan investasi terjadi seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, transfer teknologi, hingga transfer tenaga kerja dan yang terbaru ialah *Local Currency Settlement* Indonesia-Tiongkok yang menjadi topik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai kepentingan Indonesia di dalamnya.

B. Pasar Uang dan *Local Currency Settlement* di Indonesia

[97] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah peneliti jelaskan secara singkat pada Bab II bahwasanya *Local Currency Settlement* merupakan sistem transaksi perdagangan bilateral dengan memanfaatkan mata uang lokal masing-masing negara secara langsung tanpa harus melibatkan Dolar AS didalamnya yang merupakan mata uang internasional. Untuk lebih jelasnya akan peneliti jabarkan secara lebih mendetail

1. Perkembangan Pasar Uang di Indonesia

   Dalam rangka untuk mencapai visi indonesia maju, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) berupaya untuk mengembangkan pasar uang domestik menjadi pasar uang yang maju dan modern (yaitu kondisi dimana pasar uang telah dalam kondisi inklusif dan kontributif) dengan memanfaatkan momentum era digital.[98] Dilakukannya penguatan infrastruktur pasar keuangan (IPK) merupakan salah satu unsur penting dalam mencapai pasar uang yang maju dan modern, yang dilakukan dengan meningkatkan stabilitas sistem keuangan serta mengurangi resiko sistemik yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan. Saat ini, era digitalisasi telah banyak mempengaruhi perkembangan pasar keuangan. Dimana tren digitalisasi tersebut telah berhasil dalam menghilangkan secara perlahan batasan-batasan yurisdiksi antar negara serta membuka pasar uang domestik menjadi lebih mudah terhubung dengan pasar global. Dengan berbagai inovasi-inovasi baru yang terus bermunculan, membuat situasi pasar keuangan menjadi semakin maju dan modern. Contohnya, dengan hadirnya

[98] Bank Indonesia, "Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern Dan Maju Di Era Digital."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artificial intelligence (AI) dan *algorithmic trading* dalam pasar keuangan terbukti memiliki manfaat dalam meningkatkan volume dan efisiensi transaksi pasar, namun di saat yang bersamaan juga mampu mendatangkan resiko lain seperti serangan *cyber*.[99]

Dalam upaya mewujudkan pasar keuangan yang maju dan modern, Bank Indonesia telah menerbitkan Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025) yang dimaksudkan sebagai sebuah penunjuk jalan dalam upaya mewujudkan kondisi ideal dari pasar uang yang maju dan modern. Terbentuknya pasar uang yang maju dan modern itu sendiri ditandai dengan terpenuhinya produk yang sesuai, meningkatnya partisipan, dan terbentuknya harga yang jelas dengan ditunjang infrastruktur yang modern dan sesuai dengan kriteria *international best practices*[100]

Latar belakang diterbitkannya BPPU 2025 sendiri ialah guna mendukung tercapainya visi Indonesia maju. Yaitu, untuk meningkatkan mutu dari pasar keuangan domestik sehingga mampu menjadi sumber pendanaan pembangunan nasional, serta untuk menyesuaikan sistem pasar uang di tengah transformasi tren digitalisasi. Oleh sebab itu, BPPU 2025 ini dirancang sebagai langkah inisiatif sebagai alat navigasi untuk mewujudkan pasar keuangan yang maju dan modern.[101]

Bank Indonesia sendiri telah menjabarkan dengan jelas mengenai visi dan misi dari BPPU 2025. Dimana *Local Currency Settlement* juga turut

[99] *Ibid*
[100] *Ibid*
[101] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi bagian dari proyek inisiatif tersebut. Visi misi BPPU 2025 tersebut dijabarkan menjadi lima:[102]

a. BPPU 2025 bertujuan membangun pasar uang maju dan modern guna mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan mempermudah transmisi kebijakan moneter serta menguatkan stabilitas sistem keuangan.
b. BPPU 2025 berupaya mengembangkan produk yang sesuai, *pricing* yang jelas serta peningkatan pelaku pasar uang yang variatif, likuid, transparan, efisien, dan berintegritas.
c. BPPU 2025 berupaya memperkuat infrastruktur pasar uang yang efisien, andal, aman, dan terintegrasi satu sama lain.
d. BPPU 2025 berupaya mengembangkan data dan digitalisasi yang granular (detail), real-time, dan aman.
e. BPPU 2025 berupaya mewujudkan kerangka peraturan yang *industry friendly, inovatif, agile*, dan memenuhi kaidah internasional.

Selanjutnya lima visi BPPU 2025 tersebut dituangkan menjadi tiga inisiatif utama yang berfokus kepada upaya mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan, memperkuat kemudahan transmisi kebijakan moneter dan mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi serta meminimalisasi terjadinya resiko. Tiga inisiatif utama ini kemudian dijabarkan melalui empat belas *key deliverable* yang selanjutnya membentuk

[102] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima *working group* dengan tahap-tahap implementasi yang telah terukur dalam rentang waktu 2020 – 2025. Tiga inisiatif tersebut antara lain: [103]

a. Inisiatif I yakni mendorong digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan. inisiatif ini bertujuan untuk mendorong terciptanya digitalisasi dan penguatan infrastruktur pasar keuangan (IPK), yang dapat dicapai melalui lima *key deliverable* anatara lain: trading venue dan Bank Indonesia *Trading Platform* (BI-ETP), *Central Counter Party* (CCP), Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), Bank Indonesia *Real-Time Gross Settlement* (BI-RTGS), dan *Trade repository* (TR). Penguatan infrastruktur pasar keuangan (IPK) merupakan salah satu inisiatif kunci guna mendorong terwujudnya visi pasar uang modern dan maju dengan target utama yakni pelaksanaan kliring, mendorong ketersediaan akses informasi, kemudahan bertransaksi, dan penyelesaian transaksi secara aman, cepat, dan efisien. Langkah inisiatif ini merupakan landasan utama untuk dapat melangkah pada inisiatif pengembangan lainnya.

b. Inisiatif II yakni memperkuat efektivitas atau kemudahan transmisi kebijakan moneter. Inisiatif ini dapat dicapai dengan lima *key deliverable* antara lain: pengembangan repo, *Overnight Index Swap* (OIS), *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF), *Local Currency Settlement* (LCS) serta reformasi suku bunga acuan (*benchmark rate*). Pengembangan kelima inisiatif tersebut akan difokuskan menjadi

[103] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

empat aspek yang meliputi pelaku pasar, produk, pricing, serta infrastruktur yang memadai. Percepatan pengembangan infrastruktur pasar keuangan (IPK) sebagaimana inisiatif utama yang pertama, perlu didukung dengan instrument-instrumen pada inisiatif utama yang kedua. seperti pada pasar valuta asing (valas), akan dilakukan pengembangan instrumen yang memiliki fokus terhadap DNDF beserta turunannya, serta akan dilakukan juga perluasan dan pengembangan kerja sama terkait *Local Currency Settlement* (LCS) dengan negara mitra lainnya. termasuk pengembangan skema *Local Currency Settlement* (LCS) yang terintegrasi dengan open API dan *cross-border payment.*

c. Inisiatif III yakni mengembangkan sumber pembiayaan ekonomi dan pengelolaan risiko. Inisiatif utama ketiga ini merupakan inisiatif terakhir untuk mendukung pelaksanaan 5 visis misi BPPU. Inisiatif ini dapat dilakukan dengan tiga *key deliverable* diantaranya: pengembangan sumber pembiayaan ekonomi serta pengembangan sustainable and green financing, pengelolaan risiko dengan pengembangan instrumen lindung nilai jangka panjang guna mengurangi terjadinya resiko nilai tukar dan suku bunga, dan peningkatan basis investor ritel.

Dalam upaya pengembangan insfrastruktur pasar keuangan (IPK) sebagaimana telah dijelaskan pada inisiatif satu, tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai infrastruktur yang dapat mendukung upaya tercapainya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektivitas atau kemudahan dalam transmisi kebijakan moneter begitupula dengan pengembangan sumber pembiayaan nasional dan pengelolaan resiko yang telah dijelaskan pada inisiatif dua dan tiga.[104] Dalam artian, tiga inisiatif serta empat belas *key deliverable* tersebut saling terkait dan terintegrasi satu sama lain. Begitu pula dengan *Local Currency Settlement*.

Local Currency Settlement, dalam aspek penguatan produk yang telah dijelaskan pada visi misi BPPU kedua dan inisiatif kedua, penguatan produk dilakukan dengan mengembangkan dan memperluas kerja sama terkait *Local Currency Settlement* dari sisi modalitas, diantaranya dengan perluasan cakupan underlying transaksi (biaya yang dikenakan pada eksportir dan importir nasabah LCS) guna mengembangkan pasar valuta asing yang bukan Dolar AS untuk mendukung likuiditas dalam mata uang lokal, dan penambahan jumlah bank yang ditunjuk sebagai Bank ACCD untuk memperluas jangkuan nasabah *Local Currency Settlement*. Kemudian ada pula dari aspek infrastruktur, yang dilakukan dengan upaya pengembangan *Electronic Trading platform* (ETP), *Real Time Gross Settlement* (RTGS) *Multicurrency*, dan platform *omni-channel communication* yang semuanya bertujuan untuk membuat efisiensi dalam hal pricing *Local Currency Settlement*, peningkatan pelayanan transaksi valuta asing secara online, real time, dan terintegrasi dengan baik antara Bank ACCD dan nasabah *Local Currency Settlement.*[105]

[104] *Ibid*
[105] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara keseluruhan, Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 dipersiapkan untuk mempersiapkan masa depan Indonesia maju, melalui pembentukan pasar uang yang maju dan modern. BPPU 2025 digunakan sebagai visi, strategi, dan navigasi oleh Bank Indonesia dalam upaya membangun pasar uang yang maju dan modern di era tren digitalisasi.

2. Sejarah *Local Currency Settlement* di Indonesia

Indonesia pertama kali melakukan kesepakatan terkait *Local Currency Settlement* ialah dengan Malaysia dan Thailand pada 23 Desember 2016 yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan MoU sebagai bentuk tindak lanjut dari pembentukan kerangka kerja sama *Local Currency Settlement*. Kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* merupakan salah satu bentuk upaya Bank Indonesia dalam melakukan pengembangan pasar uang yang telah terlaksana sejak tahun 2018 dengan Malysia dan Thailand. Kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* memiliki tujuan dalam upaya diversifikasi transaksi bilateral antara Indonesia dengan negara mitra menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Tujuan utama dilaksanakannya kerja sama tersebut ialah guna menjaga dan memlihara kestabilan nilai tukar Rupiah yang dilakukan dengan mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS dan digantikan dengan penggunaan mata uang lokal sebagai alat transaksi, dalam artian tanpa menggunakan Dolar AS dapat meningkatkan likuiditas mata uang lokal serta mendorong diversifikasi mata uang di pasar valuta asing domestik,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga akan berkontribusi positif terhadap upaya Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. [106]

Seperti yang tercantum dalam peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor Nomor 22/ 12./PBI/2020 Tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal (*Local Currency Settlement*) Melalui Bank yang berbunyi bahwa dalam rangka mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah dibutuhkan upaya untuk mengurangi resiko terjadinya fluktuasi terhadap Rupiah, yakni dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam melakukan transaksi perdagangan bilateral dengan negara lain. Untuk mewujudkan penggunaan mata uang lokal dalam setiap transaksi perdagangan tersebut, dibentuklah kerangka *Local Currency Settlement* yang di dalamnya telah diatur sedemikian rupa yang dapat memudahkan para pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas tersebut.[107] Sehingga nantinya secara otomatis penggunaan mata uang lokal akan terdorong secara lebih masif seiring dengan semakin meningkatnya jumlah perdagangan dan investasi yang terjadi antara Indonesia dengan negara mitra.

3. Mekanisme Penerapan Local Currency Settlement

Dalam Pelaksanaannya, Saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama terkait *Local Currency Settlement* dengan empat negara mitra yakni Thailand, Malaysia, Jepang dan Tiongkok. Mekanismenya sendiri berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/12/PBI/2020 tentang penyelesaian

[106] *Ibid*
[107] Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal, dimana penunjukkan Bank yang memenuhi kriteria sebagai *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD) dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Bank sentral negara mitra guna menunjang terlaksananya transaksi dengan skema *Local Currency Settlement.*[108] Untuk lebih jelasnya peneliti akan memberikan alur menggunakan tabel yang menggambarkan mekanisme dari *Local Currency Settlement* untuk memperjelas bagaimana para pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan maupun berinvestasi secara langsung di dalam kerangka *Local Currency Settlement.*

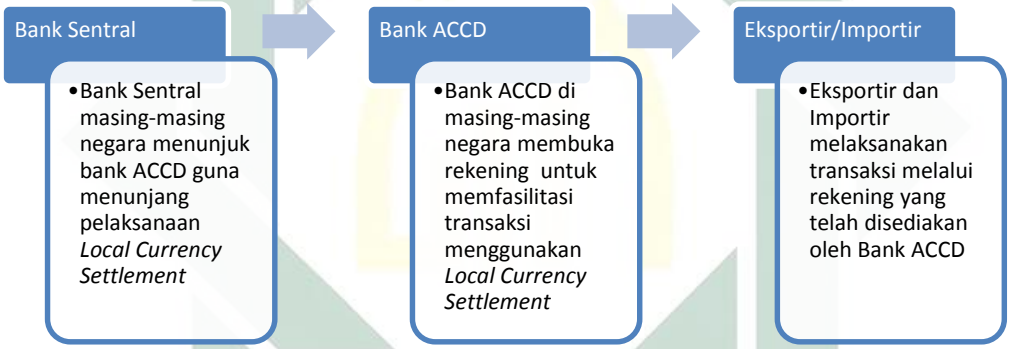

Tabel 4.1 Mekanisme Pelaksanaan Local Currency Settlement
Sumber: Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020

Melalui tabel diatas dijelaskan mengenai pembukaan rekening oleh Bank ACCD. Terdapat empat jenis rekening yeng dibuka oleh Bank ACCD dimana memiliki peran masing-masing dalam kerangka *Local Currency Settlement* yaitu:[109]

[108] Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020
[109] Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account Rupiah* atau yang disebut sebagai SNA Rupiah merupakan rekening khusus milik Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Negara Mitra dalam mata uang Rupiah yang dibuka pada Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan *Local Currency Settlement* (LCS).
b. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account Rupiah* atau yang disebut sebagai disebut Sub-SNA Rupiah merupakan rekening khusus milik importir maupun eksportir di negara mitra dalam mata uang Rupiah yang dibuka pada Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan *Local Currency Settlement* (LCS).
c. Rekening *Special Purpose Non-Resident Account* Mata Uang Negara Mitra atau yang disebut sebagai SNA Mitra merupakan rekening khusus milik Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Indonesia dalam mata uang negara mitra yang dibuka pada Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Negara Mitra untuk kepentingan pelaksanaan *Local Currency Settlement* (LCS).
d. Rekening *Sub-Special Purpose Non-Resident Account* Mata Uang Negara Mitra yang selanjutnya disebut Sub-SNA Mitra adalah rekening khusus milik importir maupun eksportir Indonesia dalam mata uang negara mitra yang dibuka pada Bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) Indonesia untuk kepentingan pelaksanaan *Local Currency Settlement* (LCS).

Empat rekening tersebut merupakan elemen penting yang mempermudah alur transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal masing-masing negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *direct quotation*. *Direct quotation* merupakan proses membeli mata uang secara langsung tanpa melalui perantara Dolar AS. Melalui rekening tersebut juga dapat melakukan investasi secara langsung yang dilakukan oleh otoritas Bank ACCD dan para pelaku usaha yang telah melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan *Local Currency Settlement* dan telah memiliki rekening di Bank ACCD. Untuk kedepannya, kerangka kerja sama *Local Currency Settlement* akan terus diperluas dengan banyak mitra dagang utama Indonesia khususnya di kawasan ASEAN, atau negara mitra di kawasan lainnya seperti Korea Selatan dan India selama hal tersebut dapat mendukung kepentingan Bank Indonesia. Berkaitan dengan perluasan kerja sama tersebut jumlah negara yang akan bermitra dengan Indonesia menggunakan *Local Currency Settlement* sangat mungkin untuk terus bertambah mengingat cukup banyak negara yang memiliki hubungan baik dalam hal perdagangan dengan Indonesia[110]

4. Manfaat Penerapan Local Currency Settlement

Bank Indonesia membuat kesepakatan terkait *Local Currency Settlement* bukan tanpa alasan. Dalam pelaksanaanya, *Local Currency Settlement* mempunyai manfaat bagi perkembangan perekonomian Indonesia diantaranya:

a. Mengurangi volatilitas nilai tukar mata uang lokal terhadap Dolar

Penggunaan *Local Currency Settlement* dalam perdagangan membawa manfaat tidak hanya bagi negara namun juga bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya *Local Currency Settlement*, para

[110] Bank Indonesia, "Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern Dan Maju Di Era Digital."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku usaha atau eksportir/importir menjadi tidak perlu khawatir terhadap resiko volatilitas penukaran nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang tajam dalam periode singkat, sehingga para pelaku usaha dapat membuat rencana cadangan untuk mengurangi resiko kerugian akibat Dolar AS yang cenderung fluktuatif. Fenomena ini terjadi disebabkan *direct quotation* antar mata uang lokal dimana Dolar AS tidak menjadi acuan dalam perdagangan menggunakan *Local Currency Settlement*.[111]

b. Harga transaksi yang lebih terjangkau

Dalam pelaksanaan *Local Currency Settlement* dikenal istilah *direct quotation* atau kuotasi langsung mata uang lokal dengan mata uang negara mitra tanpa melibatkan Dolar AS. kebalikan dari *direct quotation* ialah *cross rate* dimana Dolar AS turut berperan dalam transaksi perdagangan. Transaksi dengan skema *Local Currency Settlement* yang menggunakan *direct quotation* antara, THB/IDR, MYR/IDR, JPY/IDR, maupun CNY/IDR menjadi lebih murah dibandingkan dengan *cross rate*, dikarenakan konversi hanya terjadi satu kali atau langsung yang mana hal ini dapat meringankan beban transaksi para pelaku usaha.[112]

c. Mempermudah Investasi ke Luar Negeri.

---

[111] "Pengusaha Sebut Ada Tiga Keuntungan Jika Transaksi Perdagangan RI-China Pakai Mata Uang Lokal," Tribunnews.com, accessed October 14, 2021, https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/23/pengusaha-sebut-ada-tiga-keuntungan-jika-transaksi-perdagangan-ri-china-pakai-mata-uang-lokal.

[112] "Dear Pengusaha, Ini Keuntungan Jika RI Berani Tinggalkan Dolar AS," SINDOnews.com, accessed October 14, 2021, https://ekbis.sindonews.com/read/504466/33/dear-pengusaha-ini-keuntungan-jika-ri-berani-tinggalkan-dolar-as-1628327320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ditunjuknya Bank ACCD oleh Bank Indonesia dan Bank sentral negara mitra maka hal tersebut menghendaki para pelaku usaha di Indonesia untuk membuka rekening mata uang negara mitra di Indonesia, begitu pula dengan para pelaku usaha di negara mitra yang juga dapat membuka rekening mata uang Rupiah di luar negaranya. Dengan demikian para pelaku usaha yang hendak melakukan investasi di luar negeri, dapat langsung melakukan dengan mata uang lokal mereka masing-masing yang secara otomatis akan dikonversikan oleh Bank ACCD dengan *direct quotation.* [113]

d. Mengurangi penggunaan Dolar AS yang cenderung fluktuatif.

Penggunaan *Local Currency Settlement* sebagai salah satu sistem transaksi Indonesia yang disepakati dengan beberapa negara mitra secara tidak langsung dapat mengurangi penggunaan dan peredaran Dolar AS di Indonesia walaupun belum signifikan namun pembatasan tersebut mampu mengurangi resiko volatilitas Rupiah terhadap Dolar AS. Sebagai ilustrasi, bahwa selama ini Indonesia melakukan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan Dolar AS. Sehingga berakibat pada risiko ketidakpastian harga pasar dan volatilitas cukup tinggi. Kasus lain terjadi, ketika Indonesia hendak menggenjot perekonomian, maka impor adalah salah satu yang tidak terhindarkan. Dan hal tersebut membutuhkan pasokan Dolar AS dalam memenuhi hal tersebut. Apabila harga Rupiah terhadap Dolar AS tiba-tiba terjun bebas, maka akan terjadi krisis ekonomi. Dengan tingginya penggunaan

[113] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang lokal oleh Indonesia dengan beberapa negara mitra, maka dapat mengurangi resiko terjadinya fluktuasi Dolar AS yang tidak diharapkan.[114]

Secara umum, transaksi menggunakan *Local Currency Settlement* menunjukkan perkembangan yang positif. Dengan skema *direct cuotation* atau kuotasi langsung membuat efisiensi harga yang dihasilkan oleh kerangka *Local Currency Settlement* (LCS) diniliai cukup kompetitif jika dibandingkan dengan kuotasi harga yang dihasilkan dari *cross rate* atau kuotasi silang, sehingga menyebabkan kerangka *Local Currency Settlement* sangat berpotensi untuk dikembangkan. Selain itu guna mendukung penerapan *Local Currency Settlement,* Bank Indonesia melalui Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 berinisiatif untuk mengintegrasikannya dengan teknologi digital melalui integrasi transaksi yang menggunakan *Local Currency Settlement* dengan *Quick Response Indonesia Standard* (QRIS), dan Open API. Sehingga dengan memanfaatan teknologi digital tersebut, nantinya transaksi dengan menggunakan *Local Currency Settlement* dapat dipantau secara online dan *real time* dengan data transaksi yang didapat lebih detail sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses transaksi menggunakan *Local Currency Settlement*.[115]

5. Negara Mitra Dalam Penerapan *Local Currency settlement* (LCS)

---

[114] Cantika Adinda Putri, "Berani Lepas Ketergantungan Dolar AS, Apa Untungnya Buat RI?," CNBC Indonesia, accessed October 14, 2021, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210802221014-17-265594/berani-lepas-ketergantungan-dolar-as-apa-untungnya-buat-ri.

[115] Bank Indonesia, "Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern Dan Maju Di Era Digital."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka perluasan jangkauan penerapan *Local Currency Settlement*, Indonesia melakukan kesepakatan dengan penandatanganan MoU bersama negara-negara mitra. Indonesia memanfaatkan hubungan kerja sama yang telah dimiliki dalam hal ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara mitra. Negara mitra Indonesia dalam menggunakan *Local Currency Settlement* sejauh ini berjumlah empat yaitu Malaysia, Thailand, Jepang dan Tiongkok. Untuk lebih detailnya ialah sebagai berikut:

b. *Local Currency Settlement* Indonesia-Malaysia

Indonesia melakukan kesepakatan dan penandatangannan MoU terkait *Local Currency Settlement* dengan Malaysia pada 23 Desember 2016 bersama dengan Thailand. Kemudian setelah mengalami proses pertimbangan dan perkembangan, Bank Indonesia bersama Bank Negara Malaysia menyepakati bahwa *Local Currency Settlement* mulai efektif per 2 Januari 2018 dengan ditunjuknya Bank ACCD dari pihak Indonesia dan Malaysia. Bank ACCD tersebut antara lain: Bank BRI, Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Bank Maybank, Bank BCA, dan Bank BNI di wilayah Indonesia Sedangkan di Malaysia antara lain: CIMB Bank Berhad, Hong Leong Bank Berhad, Malayan Banking Berhad, Public Bank Berhad, dan RHB Bank Berhad. Dengan ditunjuknya Bank ACCD oleh Bank Indonesia bersama dengan Bank Negara Malaysia maka, dilakukanlah pembukaan rekening SNA Rupiah dan SNA Ringgit guna melakukan kegiatan perdagangan dan investasi langsung antara Malaysia dan Indonesia menggunakan *Local Currency*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Settlement. Berikut dibawah peneliti sajikan data total perdagangan Indonesia dengan Malaysia periode 2016 hingga Juni 2021.[116]

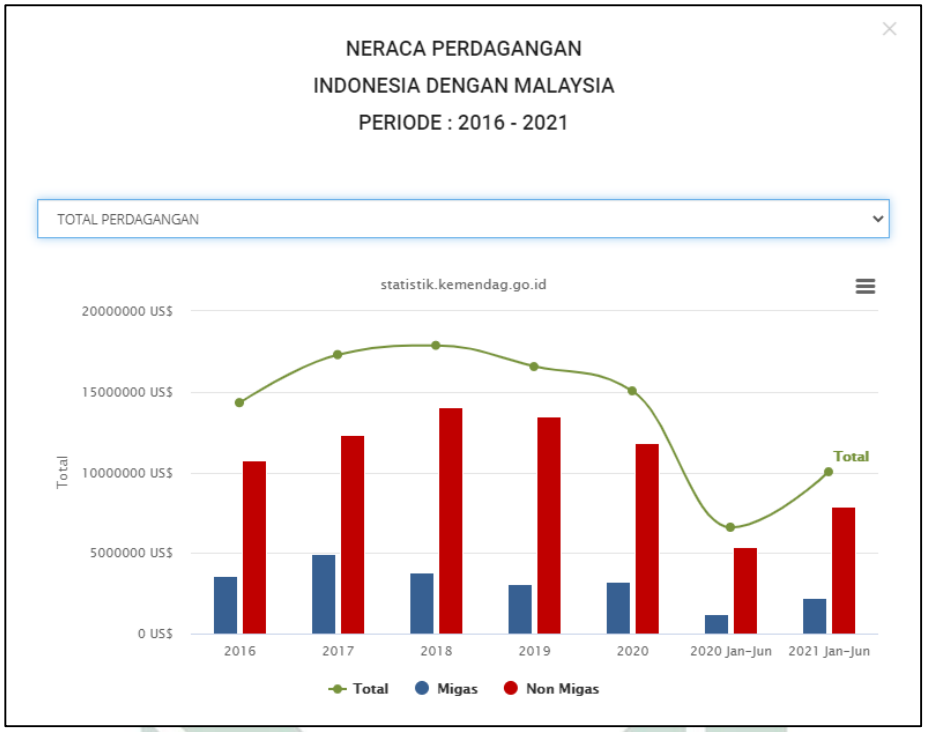

Grafik 4.2 Total Perdagangan Indonesia-Malaysia

Sumber: Kementerian Perdagangan

c. *Local Currency Settlement* Indonesia-Thailand

Indonesia melakukan kesepakatan dan penandatangannan MoU terkait *Local Currency Settlement* dengan Thailand pada 23 Desember 2016 bersama dengan Malaysia. Kemudian setelah mengalami proses pertimbangan dan perkembangan,

[116] "Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/12/PADG/2017 Tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Antara Indonesia Dan Malaysia Menggunakan Rupiah Dan Ringgit Melalui Bank," accessed October 14, 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_191217.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia bersama Bank of Thailand menyepakati bahwa *Local Currency Settlement* mulai efektif per 2 Januari 2018 dengan ditunjuknya Bank ACCD dari pihak Indonesia dan Thailand. Bank ACCD tersebut antara lain: Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bangkok Bank, dan Bank BCA di wilayah Indonesia Sedangkan di Thailand antara lain: Bangkok Bank PCL, Bank of Ayudhya PCL, Kasikornbank PCL, Krungthai Bank PCL, dan Siam Commercial Bank PCL. Dengan ditunjuknya Bank ACCD oleh Bank Indonesia bersama dengan Bank of Thailand maka, dilakukanlah pembukaan rekening SNA Rupiah dan SNA Baht guna melakukan kegiatan perdagangan dan investasi langsung antara Thailand dan Indonesia menggunakan *Local Currency Settlement*. Berikut dibawah peneliti sajikan data total perdagangan Indonesia dengan Thailand periode 2016 hingga Juni 2021.[117]

[117] "Siaran Pers Bersama: Bank Indonesia Dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal," accessed October 14, 2021, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_211220.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

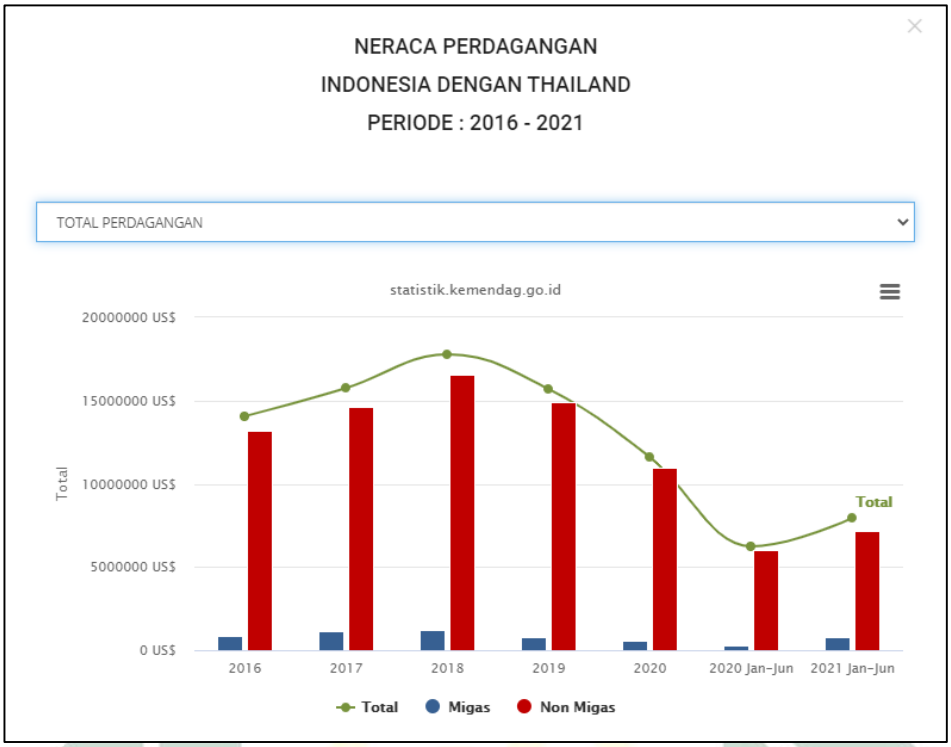

Grafik 4.3 Total Perdagangan Indonesia-Thailand

Sumber: Kementerian Perdagangan

d. *Local Currency Settlement* Indonesia-Jepang

Indonesia melakukan kesepakatan dan penandatangannan MoU terkait *Local Currency Settlement* dengan Jepang pada 5 Desember 2019. Kemudian setelah mengalami proses pertimbangan dan perkembangan, Bank Indonesia bersama Bank of Japan menyepakati bahwa *Local Currency Settlement* mulai efektif per 31 Agustus 2020 dengan ditunjuknya Bank ACCD dari pihak Indonesia dan Thailand. Bank ACCD tersebut antara lain: MUFG Bank, Bank Mizuho, Bank BTPN, Bank BNI, Bank BCA Bank BRI, dan Bank Mandiri di wilayah Indonesia Sedangkan di Jepang antara lain: Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank Ltd, PT Bank BNI Tbk, Tokyo Branch, Resona Bank, Ltd, dan Sumitomo Mutsui Banking Corp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ditunjuknya Bank ACCD oleh Bank Indonesia bersama dengan Bank of Japan maka, dilakukanlah pembukaan rekening SNA Rupiah dan SNA Yen guna melakukan kegiatan perdagangan dan investasi langsung antara Jepang dan Indonesia menggunakan *Local Currency Settlement.* Berikut dibawah peneliti sajikan data total perdagangan Indonesia dengan Jepang periode 2016 hingga Juni 2021.[118]

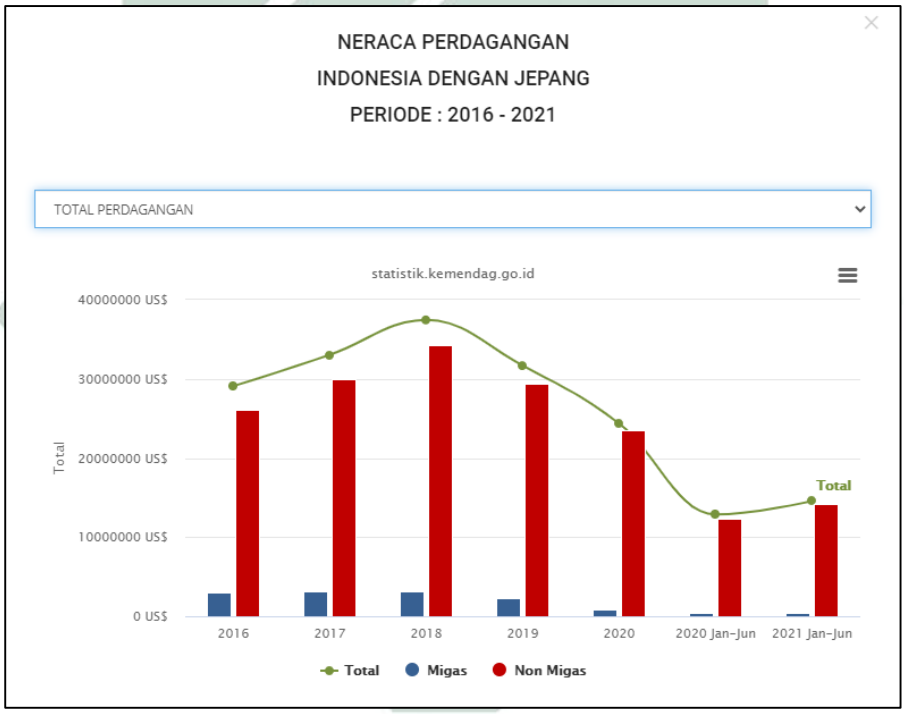

Grafik 4.4 Total Perdagangan Indonesia-Jepang
Sumber: Kementerian Perdagangan

e. *Local Currency Settlement* Indonesia-Tiongkok

[118] "JAIPONG," JAIPONG, accessed October 14, 2021, https://www.dashboard.kbritokyo.jp/search?q=local%20currency%20settlement.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian paling baru ialah Indonesia telah menyepakati kesepakatan dan penandatanganan MoU terkait *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok pada 30 September 2020 dan efektif pada 6 September 2021. Namun, status Tiongkok disini berbeda dengan negara lain dimana Tiongkok untuk saat ini merupakan mitra dagang utama Indonesia.

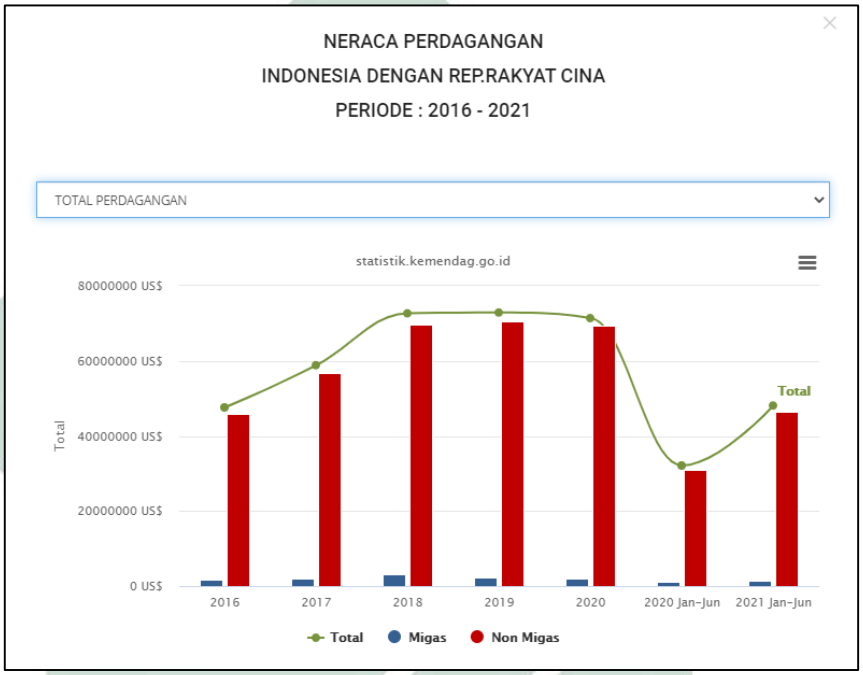

Grafik 4.5 Total Perdagangan Indonesia-Tiongkok
Sumber: Kementerian Perdagangan

Dari data yang peneliti dapatkan melalui Kementerian Perdagangan dapat dilihat bahwa Tiongkok merupakan pemasok terbesar perekonomian Indonesia baik dari sektor impor maupun ekspor yang dapat dilihat melalui diagram 4.6 yang tersaji di bawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

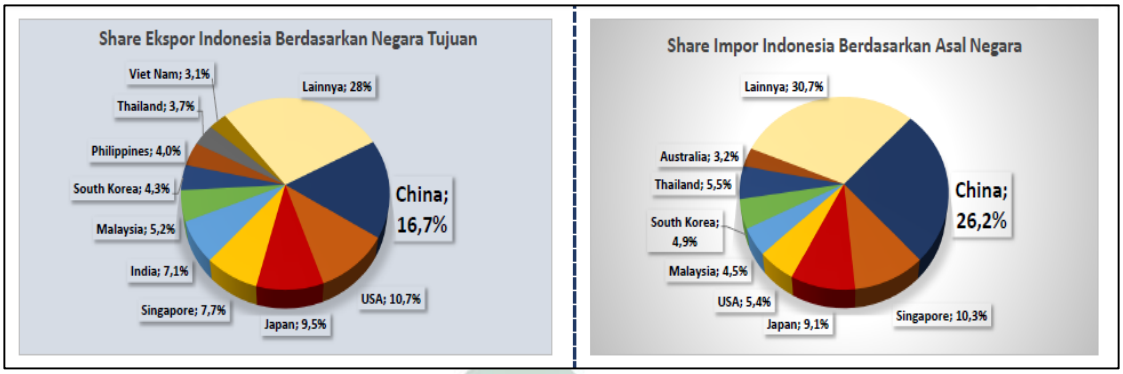

Diagram 4.6 Total Share Perdagangan di Indonesia
Sumber: Webinar BPPP Kemendag "Implikasi penerapan Local Currency Settlement Indonesia dengan Tiongkok"

Tabel diatas memperlihatkan perbandingan aktifitas perdagangan impor dan ekspor Indonesia dengan beberapa negara. Dari sektor ekspor antara lain terdapat:

1. Vietnam dengan total ekspor terhadap Indonesia sebesar 3,1%,
2. Thailand sebesar 3,7%,
3. Filipina sebesar 4,0%,
4. Korea Selatan sebesar 4,3%,
5. Malaysia sebesar 5,2%,
6. India sebesar 7,1%,
7. Singapore sebesar 7,7%,
8. Jepang sebesar 9,5%,
9. Amerika Serikat sebesar 10,7%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. dan terakhir Tiongkok memimpin dengan tingkat ekspor sebesar 16,7% sementara 28% berasal dari negara lain.

Disisi lain dari sektor impor terlihat terdapat:

1. Autralia sebesar 3,2%,
2. Malaysia sebesar 4,5%,
3. Korea Selatan sebesar4,9%,
4. Amerika Serikat sebesar 5,4%,
5. Thailand sebesar 5,5%,
6. Jepang sebesar 9,1%
7. Singapura sebesar 10,3%,
8. Dan terakhir lagi-lagi dimpimpin oleh Tiongkok dengan tingkat impor sebesar 26,2%, sementara 30,7% berasal dari negara lain.

Tiongkok juga terus mengalami perkembangan perekonomian yang cukup baik dalam 20 tahun terakhir dan mampu melampaui Amerika Serikat. Ditambah dengan program unggulan dari Tiongkok *Belt and Road initiative* yang dibentuk oleh Tiongkok sejak tahun 2013 dengan nama *One Belt One Road* (OBOR) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghendaki Tiongkok untuk membuka jalur kerjasama perdagangan dan investasi dengan 140 negara yang tersebar dari berbagai benua.[119]

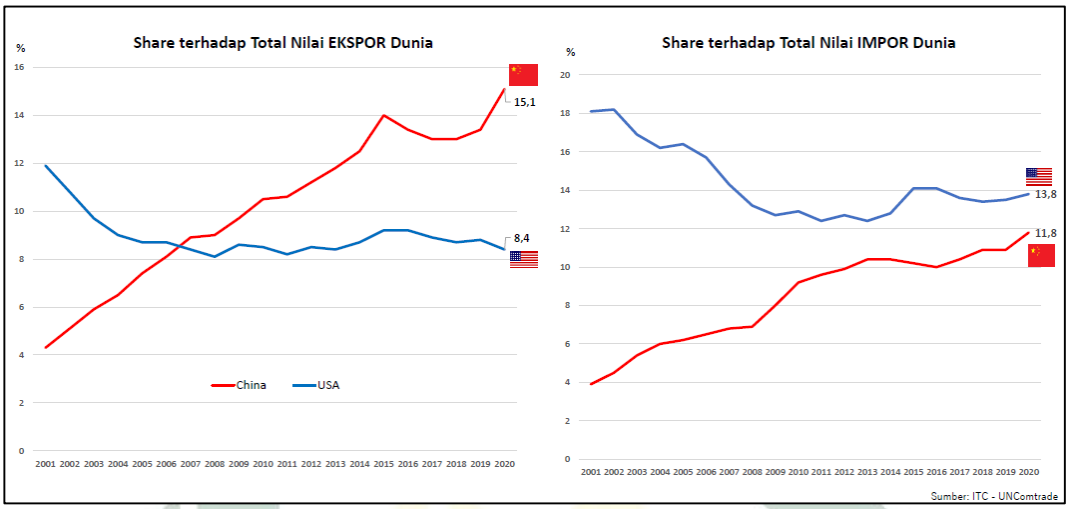

Grafik 4.7 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok vs Amerika Serikat
Sumber: Webinar BPPP Kemendag "Implikasi penerapan Local Currency Settlement Indonesia dengan Tiongkok"

Grafik diatas merupakan perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Tiongkok dengan Amerikat Serikat terhitung dari 2001. Sebagai pemegang mata uang terkuat di dunia dengan Dolar AS nya, Amerika Serikat mengalami penurunan terhdap nilai ekspor dan impornya, sedangkan Tiongkok terus mengalami pertumbuhan signifikan bahkan nilai share ekspornya dapat jauh melampaui Amerika Serikat dengan total 15,1% dibanding dengan Amerika Serikat dengan total 8,4%.

Selaras dengan pertumbuhan perekonomian Tiongkok yang cenderung naik dengan signifikan, Tiongkok juga menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia dibanding negara lainnya seperti yang telah peneliti

[119] Christoph Nedopil Wang, "Countries of the Belt and Road Initiative (BRI) – Green Finance & Development Center," accessed October 14, 2021, https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelasakan pada tabel-tabel sebelumnya. Namun hal tersebut tidak sebanding dengan tingkat likuiditas pada mata uang Yuan dan Rupiah terhadap total perdagangan di Indonesia seperti yang terlihat pada tabel berikut.

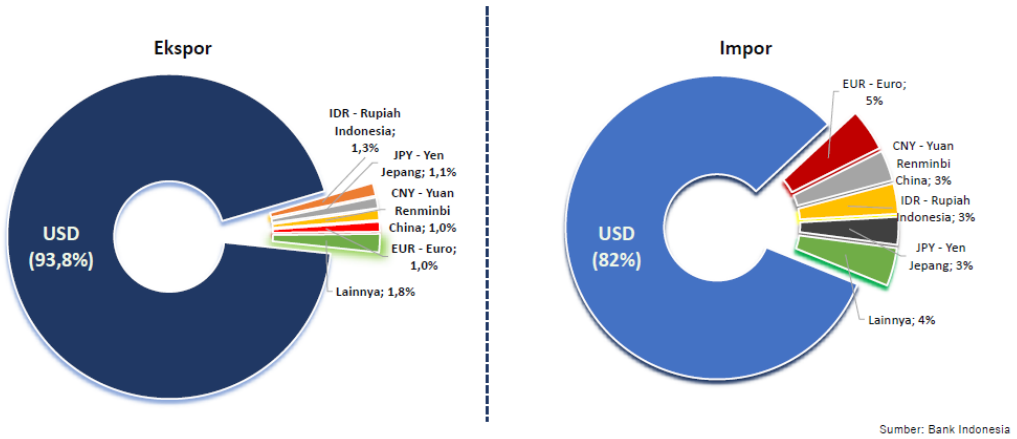

Diagram 4.8 Tingkat Likuiditas Dolar AS yang Masih Mendominasi Pasar Valuta Asing di Indonesia

Sumber: Webinar BPPP Kemendag "Implikasi penerapan Local Currency Settlement Indonesia dengan Tiongkok"

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa walaupun total perdagangan Indonesia-Tiongkok jauh lebih besar dibanding Indonesia-Amerika Serikat, akan tetapi penggunaan Yuan masih kalah jauh dibanding Dolar AS. Terlihat bahwa Dolar AS masih mendominasi perdagangan dengan total penggunaan Dolar AS dalam transaksi perdagangan ialah sebesar 93,8% dari sisi ekspornya, sementara dari sisi impor sebesar 82%. Sedangkan Indonesia (Rupiah) dengan Tiongkok (Yuan) menguasai sebesar 1,3% untuk Rupiah dan 1,0% untuk Yuan dari sisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekspor. Kemudian, dari sisi impor sendiri Rupiah dan Yuan menguasai masing-masing 3% di pasar valuta asing domestik.[120]

C. Analisis Kepentingan Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Kerjasama *Local Currency Settlement*

Setelah dilakukan upaya penyajian data, langkah selanjutnya ialah analisis mendalam terkait rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti yaitu "Mengapa Indonesia menyepakati kerja sama terkait *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok" dalam artian ada kepentingan apa dibalik kesepakatan tersebut. Peneliti akan memulai untuk menganalisis argumentasi diatas dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu nantinya pada sub-bab ini akan dilakukan peleburan data untuk dianalisis sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

1. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Ekonomi Nasional

Semakin tinggi tingkat perdagangan suatu negara terhadap negara lain baik bilateral ataupun multilateral, maka tingkat kebutuhan terhadap mata uang Dolar AS sebagai mata uang internasional akan semakin tinggi. Keadaan ini akan semakin memberatkan bagi suatu negara apabila neraca perdagangannya mengalami devisit (nilai import suatu negara lebih besar dari nilai ekspor). Sehingga cadangan devisa dalam negeri suatu negara akan

[120] Mohammad Faisal, Webinar BPPP Kemendag "Implikasi penerapan Local Currency Settlement Indonesia dengan Tiongkok" http://bppp.kemendag.go.id/berita/foto/view/MzQx/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin terkuras. Apabila neraca perdagangan surplus (nilai import suatu negara lebih kecil dari pada nilai ekspornya), nasibnya akan lebih baik karena dapat menyimpan pundi pundi cadangan devisa. Tetapi apapun keadaannya baik nilai perdagangan suatu negara itu mengalami surplus maupun devisit, akan lebih menguntungkan jika suatu negara tersebut menggunakan mata uangnya sendiri, karena pembangunan dalam negeri suatu negara akan dibiayai dengan menggunakan mata uang lokal, tentunya harus mengandalkan komponen lokal (produksi dalam negeri). Namun pastinya semua neraca perdagangan yang surplus akan sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu ketergantungan terhadapa mata uang dunia (Dolar AS) akan sangat berdampak apabila terjadi krisis ekonomi global khususnya terhadap negara-negara berkembang (*soft currency*) sebagaimana yang terjadi pada tahun 2015 dimana terjadi pelemahan mata uang global terhadap Dolar AS yang menciptakan permintaan terhadap barang komoditas ekspor dunia menurun signifikan. Akibatnya terhadap Indonesia ialah turunnya harga komoditas utama dari sektor ekspor Indonesia yang secara langsung memiliki dampak kepada neraca perdagangan Indonesia sehingga yang terjadi ialah pelemahan Rupiah. Sebagai contoh harga kelapa sawit pada pasar internasional turun 22% menjadi Rp8.000 dari sebelumnya Rp,11.000 per Kilogram, harga batu bara turun 38% menjadi Rp,776.000 per ton dari sebelumnya Rp,1.200.000 per ton, dan turun sebesar 71% menjadi Rp,16.000 per Kilogram dari sebelumnya Rp,57.000 per Kilogram. Disaat Rupiah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami pelemahan, seharusnya harus ada peningkatan dari sektor ekspor. Namun, dikarenakan harga dari komoditas ekspor Indonesia tersebut anjlok, maka akan berpengaruh terhadap neraca perdagangan dan akan beresiko defisit sehingga dapat mendorong terjadinya depresiasi terhadap Rupiah. [121]

Dengan adanya hal seperti diatas pemerintah Indonesia akan melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam segala bidang dari masa ke masa guna memenuhi kewajiban konstitusional (tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan alinea keempat) sebagai negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[122] Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi nasional dapat dilakukan dengan beberapa hal seperti:

a. meningkatkan mutu sumber daya manusia
b. Mengelola sumber daya alam dengan baik dan melestarikannya
c. Mengembangkan inovasi di berbagai bidang usaha
d. Memelihara dan membangun sarana prasarana infrastruktur negara
e. Investasi di pasar modal
f. Menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang global

Secara umum dapat diartikan bahwa, kebijakan *Local Currency Settlement* adalah terobosan pemerintah Indonesia dalam bidang perdagangan sebagai bentuk upaya untuk menjaga nilai tukar mata uangnya (Rupiah) terhadap mata uang utama dunia (Dolar AS). Secara sederhana dapat

[121] A Sakir, Zaida Rizqi Zainul, and Zulkifli, "Faktor-Faktor Penyebab Pelemahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika (Factors Causing The Weakening of The Rupiah against The US Dollar)," *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2020): 165–71.
[122] Pembukaan UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diilustrasikan dengan ditetapkannya perjanjian kerjasama perdagangan bilateral menggunakan skema *Local Currency Settlement*, maka akan berbanding lurus dengan berkurangnya kebutuhan Dolar AS, yang sebelumnya telah digunakan secara umum sebagai mata uang dalam transaksi perdagangan internasional. Sejauh ini Indonesia baru memiliki empat negara mitra terkait *Local Currency Settlement* yaitu Malaysia, Thailand, Jepang dan Tiongkok yang masih terus diupayakan untuk diperluas kepada negara-negara lain khususnya negara berkembang (*soft currency*) yang berada di kawasan Asia dan Afrika. Jika nantinya Indonesia telah memiliki banyak negara mitra terkait *Local Currency Settlement,* maka penggunaan Dolar AS dalam perdagangan juga akan semakin berkurang.

2. Rasionalisasi Indonesia dalam Kesepakatan dengan Tiongkok Sebagai Negara Mitra dalam *Local Currency Settlement*

Perlu diketahui bahwa Tiongkok merupakan mitra dagang utama Indonesia saat ini. Ditambah dengan adanya program dari Tiongkok *Belt and Road Initiative* menjadikan hubungan yang dimiliki oleh Indonesia dengan Tiongkok menjadi semakin erat. Sedangkan *Local Currency Settlement*, merupakan sistem transaksi yang menghendaki penggunakan mata uang lokal. Tujuan utama *Local Currency Settlement* yang tertulis dalam peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor Nomor 22/ 12./PBI/2020 ialah menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain[123], yang diharapkan mampu untuk meningkatkan diversivikasi mata uang lokal sehingga Rupiah dapat menjadi

[123] Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pondasi kekuatan dalam pengembangan pasar uang yang telah dirancang sedemikian rupa oleh Bank Indonesia dalam Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025.

Tiongkok merupakan negara yang saat ini menjadi mitra utama dalam perdagangan Indonesia yang menguasai baik sektor ekspor maupun impor di Indonesia dengan total perdagangan sebanyak 60 juta ribu Dolar AS mengalahkan Amerika yang memiliki mata uang paling kuat yakni Dolar AS, namun dengan pasar valuta asing yang masih dikuasai oleh Dolar AS.[124] Dari sini peneliti akan menjelaskan mengenai hubungan sebab akibat dari dua variabel yaitu perdagangan bilateral dengan Tiongkok (variabel independen) dan *Local Currency Settlement* (Variabel dependen), Sebagai alat analisis, peneliti menggunakan *rational choice theory* untuk mempermudah analisis data.

Kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia pada dasarnya berangkat dari tujuan perkembangan pasar uang di Indonesia yakni untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah sehingga diharapkan Rupiah mampu untuk menjadi pondasi yang kuat bagi perekonomian Indonesia. Salah satu caranya ialah dengan memanfaatkan *Local Currency Settlement*, selain berdasarkan atas kepentingan Indonesia akan kestabilan Rupiah, dengan melihat kurva dari total perdagangan Indonesia dengan negara mitra *Local Currency Settlement* lain (yang telah peneliti sajikan pada sub-bab *Local Currency*

[124] Webinar BPPP Kemendag "Implikasi penerapan Local Currency Settlement Indonesia dengan Tiongkok" http://bppp.kemendag.go.id/berita/foto/view/MzQx/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Settlement) seperti Malaysia, Thailand dan Jepang yang cenderung melorot tiga tahun terakhir ini, apabila membandingkan dengan kestabilan kurva perdagangan Indonesia dengan Tiongkok yang cenderung stabil maka menjadikan Tiongkok sebagai mitra dalam kerangka kerjasama tersebut merupakan keputusan yang tepat.

Dengan berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Kementerian Perdagangan bahwasanya Tiongkok yang notabene merupakan mitra dagang utama Indonesia, dengan total ekspor Indonesia ke Tiongkok sebesar 16,7% sedangkan dari sektor impor dari Indonesia ke Tiongkok sebesar 26,2%. Tidak sebanding dengan total perdagangan yang dihasilkan oleh Indonesia dengan Tiongkok, sebaliknya pasar valuta asing justru dipegang oleh Dolar AS yang masih mendominasi pasar di Indonesia dengan total ekspor Indonesia 93,8% perdagangan menggunakan Dolar AS sedangkan Yuan 1,0% dan Rupiah sendiri memegang1,3%. Untuk sektor impornya, sebesar 82% transaksi dilakukan menggunakan Dolar AS, berbanding jauh dengan Rupiah dan Yuan yang masing-masing memegang total perdagangan 3%.

Analisis dengan menggunakan *rational choice theory,* dapat dimulai dengan melihat upaya pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia sebagai aktor yang membuat keputusan terkait *Local Currency Settlement* yang memiliki sumber daya tak lain ialah kerangka *Local Currency Settlement* sendiri. Menurut James S Coleman, dalam melakukan pilihan rasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setidaknya telah tersedia dua pertimbangan[125] Dalam hal ini analisis dapat dilakukan dengan membandingkan antara *Local Currency Sttlement* dengan melibatkan Tiongkok dan dengan tidak melibatkan Tiongkok.

a. Dengan Tidak Melibatkan Tiongkok.

Pertimbangan pertama ialah apabila Indonesia tidak melibatkan Tiongkok dalam kerangka *Local Currency Settlement*, jika diilustrasikan secara sederhana ialah total *share* perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan Tiongkok yang seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah-Yuan tidak dapat terlaksana. Sebaliknya perdagangan Indonesia-Tiongkok masih tetap menggunakan Dolar AS dalam transaksinya. Maka jika dikaitkan dengan tujuan Indonesia dalam rangka penegembangan pasar uang dan juga prinsip dasar hukum ekonomi ceteris paribus, adalah potensi yang dapat dilakukan dengan total *share* perdagangan Indonesia-Tiongkok di pasar Indonesia dapat diakatakan terbuang cuma-cuma. Karena apabila Indonesia tidak memanfaatkan posisi Tiongkok, maka yang terjadi ialah transaksi perdagangan akan terus menggunakan Dolar AS sehingga menjadikan Dolar AS akan semakin kuat nilainya dihadapan Rupiah. Hal tersebut terjadi karena masih tingginya kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap Dolar AS.

b. Dengan Melibatkan Tiongkok

[125] Ritzer, *Sociological Theory,* 8th ed (New York: McGraw-Hill, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebaliknya pertimbangan kedua ialah dengan melibatkan Tiongkok. Jika diilustrasikan secara sederhana ialah perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok yang seharusnya dilakukan dengan melibatkan Dolar AS, apabila dilakukan dengan menggunakan *Local Currency Settlement* maka transaksi dilakukan dengan tidak melibatkan Dolar AS, melainkan langsung menggunakan mata uang lokal masing-masing negara yakni Rupiah-Yuan. Dalam artian dengan melibatkan Tiongkok, maka yang terjadi ialah adanya pemanfaatan maksimal terhadap total share perdagangan Indonesia-Tiongkok. Dikarenakan tidak melibatkan Dolar AS dalam transaksinya, maka kebutuhan terhadap Dolar AS juga akan berkurang sehingga dapat menciptakan stabilitas Rupiah dihadapan Dolar AS. Maka dari itu, pilihan terbaik yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia (Bank Indonesia) dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah ialah mengikutsertakan Tiongkok sebagai negara mitra dagang Indonesia dalam *Local Currency Settlement.*

Untuk mendukung dua pertimbangan diatas pemerintah Indonesia telah mendorong dari masa ke masa pembangunan nasional guna mewujudkan "**surplus"** perdagangan nasional dengan semua negara khususnya pada saat ini dengan Tiongkok untuk itu pemerintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan strategi pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah yang pada dasarnya diarahkan untuk:[126]

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi potensial jawa Sumatra. Dan meningkatkan ekonomi-ekonomi diluar jawa Sumatra sebagai pendukung momentum tersebut.
2. Meningkatkan perdagangan antar wilayah dan antar pulau dengan tujuan pertumbuhan peningkatan ekonomi domestik
3. Menciptakan ekonomi-ekonomi unggulan pada tiap-tiap wilayah dari desa sampai provinsi.
4. Melakukan percepatan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal. Dengan cara meningkatkan pembangunan yang sifatnya padat karya pada wilayah-wilayah tersebut untuk memicu perputaran ekonomi.

Pembangunan nasional adalah pembangunan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu seluruh rakyat Indonesia harus turut serta dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional tidak hanya dilakukan dalam tataran ekonomi saja melainkan juga dalam tatanan sosial budaya politik pertahanan dan keamanan atau POLEKSOSBUDHANKAM. Tujuan akhir

[126] Kompas Cyber Media, "Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pembangunan Nasional," KOMPAS.com, January 26, 2021, https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/26/135950969/upaya-pemerintah-dalam-melaksanakan-pembangunan-nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia untuk hidup adil dan makmur dan berdaya saing.[127]

3. Potensi dampak dari kesepakatan Indonesia-Tiongkok dalam *Local Currency Settlement*

Setelah mengetahui alasan dibalik pemilihan Tiongkok sebagai salah satu negara mitra dalam *Local Currency Settlement*, yang perlu kita ketahui setelahnya ialah potensi dampak dari kebijakan tersebut. Untuk potensi dampaknya sendiri ialah berkurangnya penggunaan Dolar AS dalam transaksi perdagangan. Perdagangan menggunakan Dolar AS akan berkurang khusunya dengan negara-negara yang telah bergabung dalam *Local Currency Settlement* dengan Indonesia seperti Malaysia, Thailand, Jepang terutama dengan Tiongkok yang notabene memiliki porsi perdagangan paling besar dengan Indonesia.

Setelah terlaksananya *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok, maka akan memudahkan Indonesia dalam rangka menjaga stabilitas nilai Rupiah. Tentunya tidak serta merta akan langsung seketika itu terjadi namun butuh proses yang pasti akan memakan waktu untuk menunggu masyarakat familiar dengan sistem *Local Currency Settlement*, dan juga seiring dengan bertambahnya mitra Indonesia terkait *Local Currency Settlement.* Selain itu potensi dampak lain dari perdagangan Indonesia-Tiongkok yang "dimesrakan" dengan *Local Currency Settlement* mampu memicu investasi

[127] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar-besaran di segala bidang oleh pemerintah Tiongkok ke Indonesia yang total investasinya pada tahun 2019 mencapai 4,7 M Dolar AS nilai ini menjadi investasi yang paling dominan yang masuk ke Indonesia menggeser posisi Singapura.[128]

Dalam berhubungan antar bangsa-bangsa baik itu hubungan diplomatik perdagangan, pertahanan, kemanan sudah sepatutnya pemerintah mendorong dan mengupayakan tejadinya hubngan pada bidang-bidang tersebut yang berimbang.kepada semua negara yang menjalin kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi dominasi pengaruh dalam hal budaya politik apalagi pertahanan dan keamanan sebagai akibat dari dominasi perdagangan dari salah satu negara sahabat. Sehingga akan tercipta dan mengokohkan politik luar negeri Indonesia yang "bebas dan aktif"

[128] Muhammad Zulfikar Rakhmat, "Dampak Penting Kesepakatan Indonesia Dan Cina Untuk Mempromosikan Penggunaan Yuan Dan Rupiah," The Conversation, accessed October 20, 2021, http://theconversation.com/dampak-penting-kesepakatan-indonesia-dan-cina-untuk-mempromosikan-penggunaan-yuan-dan-rupiah-148086.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian dan analisis data yang telah peneliti uaraikan pada bab IV, serta untuk menjawab rumusan masalah pada bab I, peneliti menyimpulkan bahwa alasan Indonesia melakukan kesepakatan terkait *Local Currency Settlement* dengan Tiongkok ialah untuk meningkatkan pembangunan nasional Indonesia yang berkelanjutan, dimana Tiongkok merupakan salah satu peluang yang dimiliki oleh Indonesia. Kebutuhan Indonesia akan kestabilan nilai tukar Rupiah merupakan akar dari penelitian ini, dimana kestabilan Rupiah tersebut sulit untuk tercapai selama Dolar AS masih memegang kendali pasar valuta asing di Indonesia. Dari situ lah Indonesia melihat peluang untuk melepaskan diri dari ketergantungan akan Dolar AS yang ada pada Tiongkok.

Dikarenakan presentase tingkat perdagangan dengan Tiongkok merupakan yang terbesar dibanding negara lainnya, maka Indonesia mendapatkan potensi untuk meningkatkan penggunaan Rupiah dalam transaksi perdagangan tersebut, yang akan berbanding lurus dengan pengurangan penggunaan Dolar AS. Akibatnya akan menghindarkan Indonesia dari pelemahan nilai tukar Rupiah akibat pengaruh fluktuatif dari Dolar AS, dimana kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lain kedepannya akan lebih terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan terjaganya stabilitas nilai tukar dari Rupiah, secara otomatis akan membawa dampak positif terhadap situasi pasar di Indonesia. Dengan demikian, akan membantu untuk memenuhi tujuan daripada pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia yakni untuk mewujudkan pembangunan manusia Indonesia yang dapat hidup adil, makmur dan berdaya saing.

B. Saran

Setelah dilakukannya penelitian mengenai kepentingan yang dimiliki oleh Indonesia terhadap Tiongkok, peneliti dapat memeberikan sedikit saran kepada pemerintah Indonesia agar selalu melihat kepada dua sisi yakni manfaat yang didapatkan dari kerjasama tersebut dan juga resikonya atau dampak negatif yang didapat. Oleh karena itu *Local Currency Settlement* hendaknya dilakukan secara berimbang ke semua negara untuk menciptakan kesinambungan politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Disisi lain, penelitian ini peneliti akui masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu teruntuk para peneliti yang akan menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan untuk hendaknya dapat menambah data lebih banyak dari berbagai sumber.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Buku

"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D / Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed October 14, 2021. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046.

"Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional / Dr. Umar Suryadi Bakry | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed October 14, 2021. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1144315.

BOGDAN, Robert C. *Qualitative Research for Education*. Allyn and Bacon, 1982.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Carey, Peter B. "Orang Cina, Bandar Tol, Candu Dan Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina, 1755-1825." Accessed October 14, 2021. https://www.academia.edu/13785243/Orang_Cina_Bandar_Tol_Candu_dan_Perang_Jawa_Perubahan_Persepsi_tentang_Cina_1755_1825

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse-Kappen, and Beth A. Simmons, eds. *Handbook of International Relations*. Second edition. Los Angeles: SAGE, 2013.

Mas'oed, Mochtar. "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi.," 1990.

Ritzer, George. *Sociological Theory*. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.

Jurnal

"Rational and Society (Short), James S. Coleman.Pdf," n.d.

Ardiyanti, Septika Tri. "Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 9, no. 2 (2015): 129–51. https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5.

Arjawa, Suka. "Pilihan Rasional Di Balik Pembebasan Corby." *Global & Strategis* 8, no. 1 (2014): 49–62.

Bainus, Arry, and Junita Budi Rachman. "Editorial: Kepentingan Nasional Dalam Hubungan Internasional." *Intermestic: Journal of International Studies* 2, no. 2 (2018): 109. https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanggara, Agie. "Nasionalisme Etnis Tionghoa Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 14, no. 02 (2018). https://doi.org/10.25134/equi.v14i02.1129.

Kennedy, Posma Sariguna Johnson. "Modul Ekonomi Mikro Pasar." *Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia*, 2017, 1–29.

Mudjiyanto, Bambang. "Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 22, no. 1 (2018): 65. https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220105.

Mulyadi, Mohammad. "Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 15, no. 1 (2011): 128.

Muta, Hadi Nur. "Kepentingan Indonesia Malaysia Thailand Terhadap Kerjasama Local Currency Settlement Framework (Lcs)." *E Journal Ilmu Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2020): 212–22.

Nuechterlein, Donald E. "National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making." *British Journal of International Studies* 2, no. 3 (1976): 246–66. https://doi.org/10.1017/S0260210500116729.

Nugroho, Alifi Nur Prasetia, and Rini Riris Setyowati. "Adikuasa Perdagangan Tiongkok: Tiongkok Dalam Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia (Tinjauan Sejarah Sosial-Ekonomi Pedagang Tiongkok Di Indonesia)." *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 15, no. 2 (October 1, 2019). https://doi.org/10.21831/istoria.v15i2.27292.

Pradana, Hafid Adim. "Persepsi Suharto Dan Perubahan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Cina Pada Awal Orde Baru." *Indonesian Perspective* 1, no. 1 (2016): 23–42. https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10427.

Putri, Sindy Yulia, and Dairatul Maarif. "Kerja Sama Ekonomi-Politik Indonesia Dan Cina Pada Implementasi Program Belt and Road Initiative." *Jurnal Kajian Lemhanas RI* 7, no. 3 (2019): 53–66.

Sabaruddin, Sulthon Sjahril. "Dampak Liberalisasi Perdagangan RI-China Terhadap Perubahan Perdagangan Dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Ssebuah Pendekatan Ekuilibrium Parsial (SMART Model) Dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 3 (2016): 33. https://doi.org/10.24914/jeb.v17i3.287.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sakir, A, Zaida Rizqi Zainul, and Zulkifli. "Faktor-Faktor Penyebab Pelemahan Kurs Rupiah Terhadap Dollar Amerika (Factors Causing The Weakening of The Rupiah against The US Dollar)." *Kinerja Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2020): 165–71.

Suriah, D I. "KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PENEMPATAN PASUKAN MILITERNYA DI SURIAH Pajriansyah 1" 8, no. 4 (2020): 497–506.

Suryadi, Agita, and Pazli ". "Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerjasama Ekonomi Dengan Slovakia Dalam Bidang Energi Dan Infrastruktur." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 2 (September 23, 2015): 1–15.

Widya, Dharwis, Utama Yacob, and M Si. "Indonesia-Tiongkok Dari Khazanah Arsip Statis Indonesia-China on Archives Collection," n.d., 51–64.

Xing, Zhang, and Tansen Sen. "The Chinese in South Asia." *Routledge Handbook of the Chinese Diaspora*, 2013, 205–26. https://doi.org/10.4324/9780203100387.ch13.

Yudilla, Artha. "Kerjasama Indonesia Cina Dalam Belt and Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia." *Journal of Diplomacy and International Studies* 2, no. 1 (2019): 52–65.

Zulfira, Rachmaniar Dwi. "Dampak Hubungan Bilateral Indonesia Dengan Jepang Sebelum Dan Sesudah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (Ijepa)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 2, no. 1 (2019): 124–34. https://doi.org/10.33005/jdep.v2i1.83.

Skripsi

Arishanti, Reffida Dyah. "Kepentingan Jepang Terhadap Indonesia Di Bawah Kerjasama Bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017," 2019, 96.

Freindensan, Dutha. "Bab III Dinamika Hubungan Negara Republik Rakyat China Dan Indonesia," 2017, 81.

Hidayat, Robby. "Kerjasama Perdagangan Indonesia Dengan China Melalui ACFTA (ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA) Kerjasama Perdagangan Indonesia Dengan China Melalui ACFTA (ASEAN- CHINA FREE TRADE AREA)," 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedatangan, Awal, and Orang-orang Cina Di. "BAB 2 AWAL KEDATANGAN ORANG-ORANG CINA DI NUSANTARA HINGGA MASUK KE BOGOR 2.1 Sejarah Awal Kedatangan Orang-Orang Cina," 2009, 18–79.

Rudy, Teuku May. "Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin." Universitas Indonesia Library. Rafika Aditama, 2002. http://lib.ui.ac.id.

Siwi, Arisa Permata. "Bilateral Free Trade: Hubungan Perdagangan Indonesia-China Dalam Kerangka ACFTA." *Hubungan Internasional*, 2015, 1–17.

Rilis Pemerintah

Bank Indonesia. "Bank Indonesia : Membangun Pasar Uang Modern Dan Maju Di Era Digital." *Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025*, 2020, 1–67.

"SIARAN PERS BERSAMA: Bank Indonesia Dan Bank of Thailand Perkuat Kerja Sama Penggunaan Mata Uang Lokal." Accessed October 14, 2021. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_211220.aspx

Codingest. "Beranda - Portal Satudata Perdagangan." Satu Data Kemendag. Accessed October 13, 2021. //satudata.kemendag.go.id/.

"Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/12/PADG/2017 Tentang Penyelesaian Transaksi Perdagangan Bilateral Antara Indonesia Dan Malaysia Menggunakan Rupiah Dan Ringgit Melalui Bank." Accessed October 14, 2021. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_191217.aspx

Lembaran Negara, Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 22/ 12./PBI/2020

Artikel Online

"BI jajaki kerjasama local currency settlement dengan Jepang dan China." kontan.co.id, December 17, 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/bi-jajaki-kerjasama-local-currency-settlement-dengan-jepang-dan-china.

"Catatan Peristiwa Penting Dalam Hubungan Bilateral Tiongkok-Indonesia." Accessed October 13, 2021. https://www.fmprc.gov.cn/ce/ceindo/indo/ztbd/tk/t628164.htm.

"FAQ Local Currency Settlement." Accessed October 13, 2021. https://www.bankmandiri.co.id/faq-local-currency-settlement1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hubungan Indonesia-China: Rumit Tapi Tak Lekang Zaman." Accessed October 13, 2021. https://www.matamatapolitik.com/news/analisis-hubungan-indonesia-china-sejarah-dan-perkembangannya-saat-ini.

"Memaknai 'Tahun Persahabatan' Indonesia-Cina." Accessed October 13, 2021. http://www.politik.lipi.go.id/kolom/324-memaknai-tahun-persahabatanindonesia-cina.html.

"Peringati 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia Tiongkok Luncurkan Sampul Dan Perangko Peringatan | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Accessed October 13, 2021. https://kemlu.go.id/portal/id/read/1191/siaran_pers/peringati-70-tahun-hubungan-diplomatik-indonesia-tiongkok-luncurkan-sampul-dan-perangko-peringatan.

"Tahu Cerita Awal Kedatangan Tionghoa Di Indonesia? Begini Sejarahnya." Accessed October 14, 2021. https://www.idntimes.com/science/discovery/eka-supriyadi/sejarah-awal-kedatangan-orang-tionghoa-di-indonesia-c1c2/2.

"Upaya Pemerintah dalam Melaksanakan Pembangunan Nasional." KOMPAS.com, January 26, 2021. https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/26/135950969/upaya-pemerintah-dalam-melaksanakan-pembangunan-nasional.

Daniel, Wahyu. "Ingin Kurangi Ketergantungan Dolar AS, Ini Yang Dilakukan BI." CNBC Indonesia. Accessed October 13, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125164845-17-218585/ingin-kurangi-ketergantungan-dolar-as-ini-yang-dilakukan-bi.

E-International Relations. "Student Feature – Levels of Analysis," February 25, 2018. https://www.e-ir.info/2018/02/25/student-feature-levels-of-analysis/.

HM Soeharto. "Volume Perdagangan Indonesia-China Terus Meningkat," November 25, 2019. https://soeharto.co/volume-perdagangan-indonesia-china-terus-meningkat/.

JAIPONG. "JAIPONG." Accessed October 14, 2021. https://www.dashboard.kbritokyo.jp/search?q=local%20currency%20settlement.

Media, Kompas Cyber. "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Reformasi." KOMPAS.com, November 3, 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/03/155045169/politik-luar-negeri-indonesia-masa-reformasi.

Mediatama, Grahanusa. "Bank Indonesia dan PBoC sepakati penggunaan local currency settlement (LCS)." kontan.co.id, September 30, 2020. https://nasional.kontan.co.id/news/bank-indonesia-dan-pboc-sepakati-penggunaan-local-currency-settlement-lcs.

Putri, Cantika Adinda. "Berani Lepas Ketergantungan Dolar AS, Apa Untungnya Buat RI?" CNBC Indonesia. Accessed October 14, 2021. https://www.cnbcindonesia.com/market/20210802221014-17-265594/berani-lepas-ketergantungan-dolar-as-apa-untungnya-buat-ri.

Rakhmat, Muhammad Zulfikar. "Dampak Penting Kesepakatan Indonesia Dan Cina Untuk Mempromosikan Penggunaan Yuan Dan Rupiah." The Conversation. Accessed October 20, 2021. http://theconversation.com/dampak-penting-kesepakatan-indonesia-dan-cina-untuk-mempromosikan-penggunaan-yuan-dan-rupiah-148086.

SINDOnews.com. "Dear Pengusaha, Ini Keuntungan Jika RI Berani Tinggalkan Dolar AS." Accessed October 14, 2021. https://ekbis.sindonews.com/read/504466/33/dear-pengusaha-ini-keuntungan-jika-ri-berani-tinggalkan-dolar-as-1628327320

Tafsir Quran, https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-216

Tribunnews.com. "Pengusaha Sebut Ada Tiga Keuntungan Jika Transaksi Perdagangan RI-China Pakai Mata Uang Lokal." Accessed October 14, 2021. https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/07/23/pengusaha-sebut-ada-tiga-keuntungan-jika-transaksi-perdagangan-ri-china-pakai-mata-uang-lokal.

VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. "Pengaruh Orang Tionghoa dalam Sejarah Indonesia: Dari Majapahit hingga Penjajahan Belanda." Accessed October 14, 2021. https://voi.id/memori/6747/pengaruh-orang-tionghoa-dalam-sejarah-indonesia-dari-majapahit-hingga-penjajahan-belanda.

Wang, Christoph Nedopil. "Countries of the Belt and Road Initiative (BRI) – Green Finance & Development Center." Accessed October 14, 2021. https://greenfdc.org/countries-of-the-belt-and-road-initiative-bri/.

Welle (www.dw.com), Deutsche. "Negara Islam Berencana Ganti Dolar dengan Emas Sebagai Alat Tukar | DW | 23.12.2019." DW.COM. Accessed October 13, 2021. https://www.dw.com/id/negara-islam-berencana-ganti-dolar-dengan-emas-sebagai-alat-tukar/a-51776798.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id